

BKKBN RI : Perlu Adanya Berbagai Intervensi Tekan Stunting

Tongkulem Siregar - Editor : Revianti - 16 Nov 2022 - 14:59



KBRN, Pekanbaru: Sekretaris Utama (Sestama) BKKBN RI Tavip Agus Rayanto mengatakan bahwa stunting menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang. Hal itu diungkapkan saat menyampaikan sambutan pada acara penganjangan PKK Bangga Kencana Kesehatan Tingkat Provinsi Riau dan Pengukuhan BAAS di Provinsi Riau, Rabu (16/11/2022) di Balai Serindit, Kediaman Gubernur Riau. Dikatakan, stunting merupakan dampak dari kekurangan asupan nutrisi pada anak sejak dalam kandungan ibunya. Sehingga anak yang terlahir mempunyai potensi stunting, akan memiliki resiko lebih besar untuk terjadinya gangguan pertumbuhan dan perkembangan kepada anak. "Hal ini tentunya akan dampak luas terhadap performa dan prestasi anak," ungkapnya dihadapan Gubernur Riau, Syamsuar dan Ketua Tim PKK Provinsi Riau dan Ketua Tim PKK kabupaten/kota se Riau.

Tavip Agus Rayanto mengingatkan perlu adanya berbagai intervensi terhadap stunting ini, baik intervensi spesifik maupun intervensi sensitif harus dilakukan secara terintegrasi. Dilakukan sebagai upaya untuk memutus mata lingkaran setan penyebab stunting, khususnya pada balita dari keluarga miskin. "Upaya percepatan penurunan stunting dilakukan dengan berbagai program dan kegiatan berbasis keluarga beresiko stunting," sebutnya. Sestama BKKBN RI ini melanjutkan, upaya percepatan penurunan stunting itu meliputi penyiapan kehidupan berkeluarga, pemenuhan asupan gizi, perbaikan pola asuh, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta peningkatan akses air minum dan sanitasi.

Tavip Agus Rayanto menjelaskan, dalam kesempatan ini pemerintah memberikan ruang kepada semua pihak agar dapat berkontribusi dalam tugas mulia mengentaskan stunting, salah satunya dengan adanya program bapak atau bunda asuh anak stunting. Ia menerangkan, program bapak asuh anak stunting dan bunda asuh anak stunting hadir untuk menyediakan platform kontribusi pemangku kepentingan untuk turut ambil bagian dalam percepatan penurunan stunting, yang menyasar langsung kepada keluarga beresiko stunting dengan kelompok sasaran adalah calon pengantin, ibu hamil dan bayi berusia 0 sampai dengan 23 bulan. Jelasnya, para pemangku kepentingan dapat memilih metode penyaluran dalam bentuk baik secara langsung ataupun tidak langsung melalui pihak ketiga.

"Pemangku kepentingan juga dapat memantau dampak pemberian paket asuhan melalui mekanisme pencatatan dan pelaporan yang telah disepakati antara pemangku kepentingan dengan pihak ketiga," tutupnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Provinsi Riau Fariza mengharapkan adanya komitmen semua pihak dan stakeholder terkait dalam menurunkan angka stunting di Provinsi Riau.

"Semoga kedepannya sinergi dan komitmen seluruh pihak terkait dapat terbina dengan baik dalam mewujudkan Provinsi Riau yang berdaya saing sejahtera bermartabat unggul di Indonesia," ujarnya. Fariza menerangkan, salah satu bentuk komitmen penurunan angka stunting di Riau adalah dengan melakukan penancangan PKK bangga kencana kesehatan tingkat Provinsi Riau, sebagaimana tercantum dalam keputusan Gubernur Riau nomor: kpts1655/XI/2022 tanggal 4 November 2022 tentang pembentukan panitia pelaksana.

<https://rri.co.id/pekanbaru/kesehatan/88934/bkkbn-ri-:-perlu-adanya-berbagai-intervensi-tekan-stunting>

Sestama BKKBN Kukuhkan Ketua PPK Riau Sebagai BAAS

Tongkulem Siregar - Editor: Revianti - 16 Nov 2022 - 14:57



KBRN, Pekanbaru: Sekretaris Utama (Sestama) BKKBN RI, Tavip Agus Rayanto mengukuhkan Ketua TP PKK Riau Misnarni Syamsuar sebagai Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS), Rabu (16/11/2022) di Gedung Daerah Balai Serindit pada kegiatan pencanangan PKK Bangga Kencana Kesehatan Tingkat Provinsi Riau dan Pengukuhan BAAS di Provinsi Riau. Pengukuhan BAAS dilaksanakan dengan pemasangan selempang oleh Tavip Agus Rayanto kepada Misnarni. Selanjutnya, Ketua TP PKK Riau sebagai BAAS Provinsi Riau, juga mengukuhkan Ketua TP PKK kabupaten/kota sebagai BAAS tingkat kabupaten/kota se Riau.

Prosesi pengukuhan itu disaksikan langsung oleh Gubernur Riau Syamsuar, Kepala Dinas P3AP2KB Riau, Fariza, Kepala BKKBN Riau, Mardalena Wati Yulia, Ketua I TP PKK Riau, Suti Mulyati Edy serta tamu undangan lainnya. Usai pengukuhan, Sestama BKKBN RI Tavip Agus Rayanto menyampaikan ucapan terima kasih kepada Gubernur Riau serta jajarannya, khususnya Ketua TP PKK Riau bersama Ketua TP PKK kabupaten/kota se Riau yang telah bersedia untuk dikukuhkan sebagai bunda asuh anak stunting.

Menurut Tavip, ini sekaligus sebagai bentuk komitmen untuk mendukung program bangga kencana, salah satunya melalui kegiatan kesatuan gerak PKK bangga kencana kesehatan. "Terima kasih telah bersedia dikukuhkan sebagai bunda asuh anak stunting, semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat bagi masyarakat terutama di lingkungan Provinsi Riau," sebutnya. Sestama BKKBN RI berharap dengan dikukuhkan bunda asuh anak stunting tingkat Provinsi Riau dan

kabupaten/kota se Riau dapat menurunkan angka stunting di Indonesia khususnya di Provinsi Riau.

"Sungguh mulia peran bunda asuh anak stunting ini, untuk penanganan kemiskinan dan untuk Indonesia maju," tutupnya. Sebelumnya Gubri, Syamsuar menyampaikan ucapan terimakasih kepada Sestama BKKBN RI yang telah dua kali datang ke Riau dalam rangka mengawal program penurunan dan pencegahan stunting.

"Kami berharap Pak Sestama tidak lagi perlu turun ke daerah untuk memastikan program penurunan stunting berjalan dengan baik di Riau. Kami sudah mengalokasikan bantuan keuangan ke kabupaten/kota yang bisa digunakan untuk mencegah stunting dan menurunkan kemiskinan ekstrim, itu saja yang perlu kami awasi secara bersama-sama. Khusus dalam pencegahan stunting, Ketua PKK se Riau akan langsung menyampaikan ke jajaran agar program ini berlangsung baik," katanya.

Disisi lain, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Provinsi Riau Fariza mengharapkan adanya komitmen semua pihak dan stakeholder terkait dalam menurunkan angka stunting di Provinsi Riau. "Semoga kedepannya sinergi dan komitmen seluruh pihak terkait dapat terbina dengan baik dalam mewujudkan Provinsi Riau yang berdaya saing sejahtera bermartabat unggul di Indonesia," ujarnya. Diakhir kegiatan, diserahkan paket bantuan secara simbolis kepada anak resiko stunting oleh BAAS Provinsi Riau.

<https://rri.co.id/pekanbaru/kesehatan/88929/sestama-bkkbn-kukuhkan-ketua-ppk-riau-sebagai-baas>

Sestama BKKBN tawarkan tujuh paket pilihan turunkan stunting

Rabu, 16 November 2022 16:25 WIB



Pekanbaru (ANTARA) - Sekretaris Utama BKKBN RI Tavip Agus Rayanto, menawarkan para pemangku kepentingan bisa memilih intervensi dari tujuh paket manfaat untuk menurunkan prevalensi stunting Riau yang kini 22,3 persen itu ditargetkan turun menjadi 14 persen tahun 2024. "Ke 7 paket manfaat tersebut dapat dipilih oleh pemangku kepentingan, antara lain Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kelompok sasaran, Pembuatan akta kelahiran, dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi catin, ibu hamil dan baduta," kata Tavip Agus Rayanto di Pekanbaru, Rabu.

Ia mengatakan itu di sela pengukuhan Ibu Hj. Misnarni Syamsuar dan Ibu Ketua TP PKK Kabupaten/ Kota, sebagai Bunda Asuh Anak Stunting di Ruang Serindit, Kota Pekanbaru, disaksikan Gubernur Riau Syamsuar dan pemangku kepentingan lainnya. Sestama BKKBN menyebutkan, intervensi bantuan lainnya yang bisa dilakukan pemangku kepentingan adalah pembayaran iuran kesehatan dan fasilitasi rujukan, pemberdayaan ekonomi keluarga, bantuan jamban sehat dan air bersih dan bantuan lainnya.

Ia menyebutkan, bahwa penyaluran bantuan baik secara langsung ataupun melalui pihak ketiga dan pemangku kepentingan dapat memantau dampak pemberian paket asuhan melalui mekanisme pencatatan dan pelaporan yang disepakati antara pemangku kepentingan dan pihak ketiga melalui sistem surveilans rutin, kunjungan langsung ke kelompok sasaran dan atau mekanisme lainnya.

Untuk itu, kata Sestama intervensi spesifik dan sensitif harus terus dilakukan secara terintegrasi untuk memutus lingkaran setan penyebab stunting khususnya pada balita dari keluarga miskin itu. Gubernur Riau Syamsuar mengatakan sesuai peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 tahun 2021, tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia, salah satu strategi yang dilakukan adalah pencegahan stunting dari hulu melalui pendekatan keluarga beresiko stunting, calon pengantin, ibu hamil, ibu melahirkan, dan bayi di bawah 2 tahun, sehingga dibentuk Tim Pendamping Keluarga atau TPK di seluruh Desa/Kelurahan.

Di Provinsi Riau ada sebanyak 10.674 orang TPK, yang terdiri dari Bidan Desa, kader PKK dan Kader KB, yang mempunyai tugas mendampingi sasaran atau keluarga beresiko stunting tersebut dalam menumbuhkan kesadaran atau perubahan perilaku bagaimana pentingnya catinyang akan melangsungkan pernikahan melakukan pemeriksaan kesehatan, sehingga diharapkan saat menikah dalam keadaan sehat dan siap menjadi ibu hamil.

<https://riau.antaranews.com/berita/311977/sestama-bkkbn-tawarkan-tujuh-paket-pilihan-turunkan-stunting>

Kukuhkan BAAS se Riau Sestama: Asupan Cukup Gizi dapat Atasi Stunting

Rabu, 16 November 2022 - 17:11 WIB



RIAUMANDIRI.CO - Sekretaris Utama (Sestama) BKKBN RI Tavip Agus Rayanto mengatakan bahwa stunting menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan kualitas sumber daya manusia di masa yang akan datang. Hal itu disampaikan dalam acara pencaanangan PKK Bangga Kencana Kesehatan Tingkat Provinsi Riau dan Pengukuhan BAAS di Provinsi Riau, Rabu (16/11) di Balai Serindit, Kediaman Gubernur Riau. Acara langsung dihadiri oleh Gubri H Syamsuar dan Ketua TP PKK Riau, Hj Misnarni, Kepala Perwakilan BKKBN Riau, Mardalena Wati Yulia, PKK Kabupaten kota dan seluruh forkompinda.

Dikatakannya, stunting merupakan dampak dari kekurangan asupan nutrisi pada anak sejak dalam kandungan ibunya. Sehingga anak yang terlahir mempunyai potensi stunting, akan memiliki resiko lebih besar untuk terjadinya gangguan pertumbuhan dan perkembangan kepada anak. Tavip Agus Rayanto mengingatkan perlu adanya berbagai intervensi terhadap stunting ini, baik intervensi spesifik maupun intervensi sensitif harus dilakukan secara terintegrasi. Dilakukan sebagai upaya untuk memutus mata lingkaran setan penyebab stunting, khususnya pada balita dari keluarga miskin.

"Upaya percepatan penurunan stunting dilakukan dengan berbagai program dan kegiatan berbasis keluarga beresiko stunting," sebutnya. Sestama BKKBN RI ini melanjutkan, upaya percepatan penurunan stunting itu meliputi penyiapan kehidupan berkeluarga, pemenuhan asupan gizi, perbaikan pola asuh, peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan serta peningkatan akses air minum dan sanitasi. Tavip Agus Rayanto menjelaskan, dalam kesempatan ini pemerintah memberikan ruang kepada semua pihak agar dapat berkontribusi dalam tugas mulia mengentaskan

stunting, salah satunya dengan adanya program bapak atau bunda asuh anak stunting.

Ia menerangkan, program bapak asuh anak stunting dan bunda asuh anak stunting hadir untuk menyediakan platform kontribusi pemangku kepentingan untuk turut ambil bagian dalam percepatan penurunan stunting, yang menysasar langsung kepada keluarga beresiko stunting dengan kelompok sasaran adalah calon pengantin, ibu hamil dan bayi berusia 0 sampai dengan 23 bulan.

Jelasnya, para pemangku kepentingan dapat memilih metode penyaluran dalam bentuk baik secara langsung ataupun tidak langsung melalui pihak ketiga. "Pemangku kepentingan juga dapat memantau dampak pemberian paket asuhan melalui mekanisme pencatatan dan pelaporan yang telah disepakati antara pemangku kepentingan dengan pihak ketiga," ungkapnya. Dalam acara tersebut Sestama juga turut mengukuhkan Ketua TP PKK Riau Misnarni Syamsuar sebagai Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS) kemudian dilanjutkan dengan pengukuhan bunda asuh seluruh kabupaten kota di Riau.

Ia mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Riau serta jajarannya, khususnya Ketua TP PKK Riau bersama Ketua TP PKK kabupaten/kota se Riau yang telah bersedia untuk dikukuhkan sebagai bunda asuh anak stunting. "Terima kasih telah bersedia dikukuhkan sebagai bunda asuh anak stunting, semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat bagi masyarakat terutama di lingkungan Provinsi Riau," sebutnya. Ia berharap dengan dikukuhkan bunda asuh anak stunting tingkat Provinsi Riau dan kabupaten/kota se Riau dapat menurunkan angka stunting di Indonesia khususnya di Provinsi Riau.

Sementara itu, Gubernur Riau, H Syamsuar mengatakan bahwa dirinya sangat berterimakasih atas perhatian dsri pemerintah pusat, dalam hal pengentasan masalah stunting. Apalagi dalam mengatasi stunting di Riau ini, Sestama BKKBN RI yang telah dua kali datang ke Riau dalam rangka mengawal program penurunan dan pencegahan stunting. "Kami berharap Pak Sestama tidak lagi perlu turun ke daerah untuk memastikan program penurunan stunting berjalan dengan baik di Riau. Kami sudah mengalokasikan bantuan keuangan ke kabupaten/kota yang bisa digunakan untuk mencegah stunting dan menurunkan kemiskinan ekstrim, itu saja yang perlu kami awasi secara bersama-sama. Khusus dalam pencegahan stunting, Ketua PKK se Riau akan langsung menyampaikan ke jajaran agar program ini berlangsung baik," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Provinsi Riau Fariza mengharapkan adanya komitmen semua pihak dan stakeholder terkait dalam menurunkan angka stunting di Provinsi Riau. "Semoga kedepannya sinergi dan komitmen seluruh pihak terkait dapat terbina dengan baik dalam mewujudkan Provinsi Riau yang berdaya saing sejahtera bermartabat unggul di Indonesia," ujarnya.

Fariza menerangkan, salah satu bentuk komitmen penurunan angka stunting di Riau adalah dengan melakukan pncanangan PKK bangga kencana kesehatan tingkat Provinsi Riau, sebagaimana tercantum dalam keputusan Gubernur Riau nomor:

kpts1655/XI/2022 tanggal 4 November 2022 tentang pembentukan panitia pelaksana,"pungkasnya. (nie)

<https://www.riamandiri.co/read/detail/103423/kukuhkan-baas-se-riau-sestama-asupan-cukup-gizi-dapat-atasi-stunting>

Ikuti Sosialisasi Ran Pasti, Ketua GOW Rohul: Melalui TPPS Rohul Kita Percepat Tekan Angka Stunting

08 Maret 2022



Ketua GOW Rokan Hulu Sri Yulita Indra Gunawan ikuti sosialisasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN Pasti) untuk daerah regional 1, yang digelar secara hybrid (daring dan luring) di Aula Vidcon Diskominfo Rokan hulu, Selasa (8/3/2022). Turut Hadir mendampingi Ketua GOW, PLT Kadis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana drg. Leni Sumbari, Kepala Bidang perencanaan pembangunan sosial budaya dan pemerintahan Bappeda, Febry Ferika, ST. Serta Kader PKK Rohul.



Dimana dalam arahannya, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden, Suprayoga Hadi Menegaskan bahwa untuk percepatan penurunan angka balita stunting dari 24,4 persen pada 2021 menjadi 14 persen pada 2024, merupakan tantangan besar

sehingga diperlukan penguatan komitmen dari kepala daerah dan jajarannya. Menurutnya, target tersebut menjadi tantangan besar karena ada 10 persen angka stunting yang harus diturunkan dalam dua tahun ke depan.

"Sementara kalau melihat ke belakang, penurunan stunting 10 persen memerlukan waktu 13 tahun. Jadi harus ada upaya khusus dengan waktu yang terbatas itu, dan laju percepatannya harus dipacu lagi, supaya bisa mengejar target," lanjutnya. Selain itu, yang terpenting untuk mengejar target tersebut adalah melalui pendekatan keluarga berisiko stunting. Dirinya juga menyebutkan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021, daerah diwajibkan untuk membentuk tim percepatan penurunan stunting (TPPS) mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, sampai tingkat desa/kelurahan yang juga berpedoman pada RAN Pasti. RAN Pasti menjadi acuan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting bagi kementerian dan lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, serta pemangku kepentingan lainnya.

"Dalam RAN Pasti itu, sudah ada pedoman turunan dari Perpres Nomor 72 yang akan digunakan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting. Akan ada perbedaan penanganan stunting antara daerah yang satu dengan yang lain, karena harus disesuaikan dengan kondisi daerahnya," tutupnya. Sementara itu, Ketua GOW Rokan Hulu Sri Yulita Indra Gunawan Mengatakan upaya yang akan dilakukan tentu juga mengacu pada apa yang telah disampaikan dalam sosialisasi ini dimana ada lima upaya yang akan dilakukan, pertama diawali dengan memberikan pemahaman dan pengarahan kepada para remaja putri yang sudah produktif dari usia 15 tahun hingga 20 tahun, kedua kepada para calon pengantin, ketiga kepada Ibu Hamil, ke Empat kepada Ibu menyusui dan yang kelima memberikan asupan kepada anak sejak usia 0 sampai 59 bulan atau hingga usia dua tahun.

Hal ini juga akan dilakukan secara kolaborasi seluruh aspek dimana bagi anak ramaja yang sudah nantinya mendapatkan asupan tersebut bisa juga memberikan pengarahan dan pemahaman kepada yang lainnya, sehingga dalam upaya penurunan angka stunting ini bisa benar-benar di kejar dan bisa di hilangkan dari Kabupaten Rokan Hulu yang Kedepannya nanti tidak ada lagi anak yang akan mengalami Stunting.Selanjutnya, ditempat yang sama PLT Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) drg. Leni Sumbari memaparkan bahwa dalam upaya penurunan angka stunting ini telah dibentuk TPPS, untuk DPPKB sudah ada 927 tim pendamping keluarga, ditambah 200 tim yang ada di Desa.

"Dimana di setiap tim ada PKK, Bidan dan juga kader KB nya. Disitu nanti semua akan berkolaborasi bagaimana cara agar bisa bersama sama untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Rokan Hulu ini," ujarnya. PLT Kadis DPPKB inipun menyebutkan sesuai arahan dari Ketua TP PKK Rohul bahwa sebelumnya telah turun langsung ke Daerah daerah yang termasuk dalam lokus daerah Stunting, dimana di Kabupaten Rokan Hulu saat ini terdapat 31 Lokus dari sebelumnya hanya 10 lokus sesuai dari entri data EPGM dari Dinas Kesehatan berdasarkan dari urutan persen yang ada di atas 25 persen Stunting yang ada di Rokan Hulu, dan telah adanya SK

dari Bupati bahwa Lokus Stunting saat ini telah ada bertambah sehingga totalnya sebanyak 31 lokus.

"Upaya besar yang akan kami lakukan adalah menurunkan angka stunting di Rokan Hulu yang saat ini berada di angka 25,28 harus bisa segera diturunkan ke angka 14 sesuai dengan target Nasional," tutup Leni Sumbari.

<https://rokanhulukab.go.id/detailpost/ikuti-sosialisasi-ran-pasti-ketua-gow-rohul-melalui-tpps-rohul-kita-percepat-tekan-angka-stunting>

Identifikasi Pengukuran dan Audit Kasus Stunting Tahap III di Kabupaten Rokan Hulu

Tongkulem Siregar - Editor : Lisa syaiful - 23 Nov 2022 - 18:29



KBRN, Pekanbaru: Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Rokan Hulu melaksanakan Identifikasi Pengukuran dan Audit Kasus Stunting (AKS) Tahap III bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Kabupaten Rokan Hulu bertempat di Aula Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Rokan Hulu, Rabu (23/11/2022).

Plt. Kepala DPPKB Kabupaten Rokan Hulu mengantarkan kegiatan ini menyampaikan berkat pembiayaan dari BKKBN, kegiatan AKS Tahap III bisa dilaksanakan di Kabupaten Rokan Hulu. Sebagai Sekretaris TPPS Kabupaten Rokan Hulu bekerjasama dengan OPD terkait serta Camat se Kabupaten Rokan Hulu mengupayakan bagaimana caranya Stunting bisa hilang dari Kabupaten Rokan Hulu. Kepala Perwakilan (Kaper) BKKBN Provinsi Riau Dra. Mardalena Wati Yulia, M.Si hadir dan menyampaikan kita masih dihadapi masih tingginya anak-anak stunting di Kabupaten Rokan Hulu dari data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021, Rokan Hulu masih berada di angka 25,8 % anak yang mengalami stunting, untuk Provinsi Riau Rokan Hulu termasuk yang masih tinggi.

"Kita berharap di Tahun 2024 angka stunting turun menjadi 14%. Selanjutnya, stunting tidak bisa diobati, stunting hanya bisa dicegah," katanya. Diketahui bersama stunting disebabkan karna faktor kekurangan gizi dalam waktu yg cukup lama karna infeksi yg terlalu lama, pola pengasuhan dan lingkungan. Dampak jika anak terjadi stunting yaitu pertumbuhan nya akan terganggu, perkembangan otaknya terganggu, ketika dewasa dia akan rentan terhadap penyakit.

"Ini lah tugas kita Bapak/Ibu karna masih tinggi nya angka stunting, sesuai dengan amanat yang diberikan kepada BKKBN yaitu Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2022, BKKBN salah satu lembaga yang diamanatkan dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting", ucap Kaper BKBBN Riau, Mardalena Wati Yulia. Ada 5 hal yang harus dilakukan, salah satunya adalah melakukan Audit Kasus Stunting. Untuk itu tentu BKKBN tidak bisa bekerja sendiri, karna untuk mengaudit diperlukan ahlinya, lalu dibentuklah Tim Audit Kasus Stunting, yang mana melibatkan para pakar dan ahli terdiri dari dokter kandungan (SpOG), dokter anak, ahli gizi, dan psikolog.

"Bapak/Ibu yang memiliki anak yang beresiko stunting, akan diidentifikasi apa kenapa, sehingga diketahui kalau memang stunting apa langkah kita kedepannya, tentu tidak hanya sekedar audit, untuk itu kami berharap adanya TPPS juga hadir, karena setelah hasil nya nanti perlu ditangani misalnya oleh Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Sosial, jadi setelah audit ini tentu harus ada tindak lanjutnya. Ada 30 keluarga beresiko stunting yang akan diidentifikasi", tambah Kaper.

Kaper mengharapkan kerjasama dan konvergensinya, sehingga hasil audit stunting ini bisa ditindaklanjuti dalam upaya Penurunan Angka Stunting di Kabupaten Rokan Hulu. Turut hadir Dinas Kesehatan, Tim Pakar Audit Kasus Stunting, OPD terkait, Satgas dan Technical Assistan Percepatan Penurunan Stunting dan PKB.

<https://rri.co.id/pekanbaru/kesehatan/95010/identifikasi-pengukuran-dan-audit-kasus-stunting-tahap-iii-di-kabupaten-rokan-hulu>

BKKBN dan DPPKB Rohul Lakukan Audit Kasus Stunting Tahap III

Rabu, 23 November 2022 19:31 WIB



PEKANBARU (CAKAPLAH) - Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Rokan Hulu melaksanakan Identifikasi Pengukuran dan Audit Kasus Stunting (AKS) Tahap III bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Kabupaten Rokan Hulu bertempat di Aula Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Rokan Hulu, Rabu (23/11/2022).

Plt Kepala DPPKB Kabupaten Rokan Hulu Leni Sumbari menyampaikan berkat pembiayaan dari BKKBN, kegiatan AKS Tahap III bisa dilaksanakan di Kabupaten Rokan Hulu. "Dengan kerjasama TPPS Kabupaten Rokan Hulu dengan OPD terkait serta Camat se Kabupaten Rokan Hulu mengupayakan bagaimana caranya Stunting bisa hilang dari Kabupaten Rokan Hulu," ujar Leni Sumbari, Rabu (23/11/2022).

Kepala Perwakilan (Kaper) BKKBN Provinsi Riau Mardalena Wati Yulia yang hadir dalam kesempatan tersebut mengatakan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021, angka stunting di Rokan Hulu masih berada di angka 25,8 %. Untuk Provinsi Riau, Rokan Hulu termasuk yang masih tinggi. "Kita berharap di Tahun 2024 angka stunting turun menjadi 14%. Selanjutnya, stunting tidak bisa diobati, stunting hanya bisa dicegah," katanya. Ia mengatakan stunting disebabkan karena faktor kekurangan gizi dalam waktu yang cukup lama karena infeksi yang terlalu lama, pola

pengasuhan dan lingkungan. Dampak jika anak terjadi stunting yaitu pertumbuhannya akan terganggu, perkembangan otaknya terganggu, ketika dewasa juga akan rentan terhadap penyakit.

"Ini lah tugas kita karena masih tingginya angka stunting, sesuai dengan amanat yang diberikan kepada BKKBN yaitu Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2022, BKKBN salah satu lembaga yang diamanatkan dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting," Cakapnya. Disampaikan Mardalena, ada 5 hal yang harus dilakukan salah satunya adalah melakukan Audit Kasus Stunting. Untuk itu tentu BKKBN tidak bisa bekerja sendiri, karena untuk mengaudit diperlukan ahlinya, lalu dibentuklah Tim Audit Kasus Stunting, yang mana melibatkan para pakar dan ahli terdiri dari dokter kandungan (SpOG), dokter anak, ahli gizi, dan psikolog.

"Bapak/Ibu yang memiliki anak yang beresiko stunting, akan diidentifikasi apa kenapa, sehingga diketahui kalau memang stunting apa langkah kita kedepannya. Tentu tidak hanya sekedar audit, untuk itu kami berharap adanya TPPS juga hadir, karena setelah hasil nya nanti perlu ditangani misalnya oleh Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Sosial, jadi setelah audit ini tentu harus ada tindak lanjutnya. Ada 30 keluarga beresiko stunting yang akan diidentifikasi," sebutnya. Dirinya mengharapkan kerjasama dan konvergensi, sehingga hasil audit stunting ini bisa ditindaklanjuti dalam upaya Penurunan angka stunting di Kabupaten Rokan Hulu.

<https://www.cakaplah.com/artikel/serantau/11168/2022/11/23/bkkbn-dan-dppkb-rohul-lakukan-audit-kasus-stunting-tahap-iii>

Jumlah Kasus Stunting di Rohul Tinggi, Kepala BKKBN Riau Sampaikan Hal Ini

HendraNov 23, 2022 - 20:54



RIAUCERDAS.COM - Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) menggelar Identifikasi Pengukuran dan Audit Kasus Stunting (AKS) Tahap III, Rabu (23/11/2022). Kegiatan ini digelar bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Kabupaten Rohul di Aula Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rohul. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kabupaten Rohul tahun 2022.

Diterangkan Plt Kepala DPPKB Rohul, drg Leni Sumbari, kegiatan ini berlangsung berkat pembiayaan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Sebagai Sekretaris TPPS Kabupaten Rohul, ia bekerjasama dengan OPD terkait serta camat untuk mengupayakan bagaimana caranya stunting bisa hilang dari Kabupaten Rohul. Sementara, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau, Dra Mardalena Wati Yulia MSi menegaskan bahwa saat ini Indonesia masih diperhadapkan dengan masalah tingginya jumlah anak-anak stunting. Termasuk di Rohul.

Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021, anak stunting di Rohul masih berada di angka 25,8 persen. Di Provinsi Riau, persentase tersebut termasuk yang masih tinggi. "Kita berharap di tahun 2024 angka stunting turun menjadi 14 persen," ujarnya. Mardalena menegaskan, stunting tidak bisa diobati.

Stunting, tambahannya, hanya bisa dicegah. Dijelaskan dia, stunting disebabkan faktor kekurangan gizi dalam waktu yang cukup lama. Termasuk karena infeksi yang terlalu lama, pola pengasuhan dan lingkungan.

Anak yang mengalami stunting akan terganggu pertumbuhannya. Di samping itu, terganggu pula perkembangan otaknya. Ketika dewasa, maka yang bersangkutan rentan terhadap penyakit. "Inilah tugas kita bapak dan ibu. Karena masih tingginya angka stunting, sesuai dengan amanat yang diberikan kepada BKKBN yaitu Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2022, BKKBN salah satu lembaga yang diamanatkan dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting", tambahannya. Ada lima hal yang harus dilakukan. Salah satunya adalah melakukan Audit Kasus Stunting. Untuk itu tentu BKKBN tidak bisa bekerja sendiri. Karena untuk mengaudit diperlukan ahlinya. Untuk itu, dibentuklah Tim Audit Kasus Stunting yang mana melibatkan para pakar dan ahli terdiri dari dokter kandungan (SpOG), dokter anak, ahli gizi, dan psikolog.

"Bapak dan ibu yang memiliki anak berisiko stunting akan diidentifikasi apa kenapa? Sehingga diketahui kalau memang stunting apa langkah kita ke depannya," tutur Mardalena. Apa yang dilakukan tentunya tidak sekadar audit. Untuk itu, Mardalena berharap TPPS juga hadir. Karena setelah hasilnya nanti perlu ditangani oleh Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Sosial. "Jadi setelah audit ini tentu harus ada tindaklanjutnya. Ada 30 keluarga berisiko stunting yang akan diidentifikasi", tambah Kaper. Mardalena mengharapkan kerjasama dan konvergensinya. Sehingga hasil audit stunting ini bisa ditindaklanjuti dalam upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Rohul. (rls).

<https://www.riaucerdas.com/jumlah-kasus-stunting-di-rohul-tinggi-kepala-bkkbn-riau-sampaikan-hal-ini>

BKKBN identifikasi 30 keluarga beresiko stunting di Rohul

Kamis, 24 November 2022 12:10 WIB



Pekanbaru (ANTARA) - Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Riau Mardalena Wati Yulia menggiatkan identifikasi terhadap 30 keluarga beresiko stunting di Kabupaten Rokan Hulu agar bisa menurunkan cakupan prevalensi stunting di daerah itu yang mencapai 25,8 persen berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021.

"Prevalensi stunting di Rohul masih tinggi jika dibandingkan rata-rata Provinsi Riau sebesar 22,3 persen itu, sehingga diperlukan kerjasama dan konvergensi agar prevalensi stunting di Riau bisa mencapai 14 persen tahun 2024 sesuai target pemerintah," kata Mardalena Wati Yulia, di Rohul, Rabu. Ia mengatakan itu, pada acara Identifikasi Pengukuran dan Audit Kasus Stunting (AKS) Tahap III bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Kabupaten Rokan Hulu digelar Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Rokan Hulu, di Aula Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Rokan Hulu pada Rabu (23/11).

Mardalena mengatakan, stunting tidak bisa diobati akan tetapi stunting hanya bisa dicegah. Penyebab stunting adalah karena faktor kekurangan gizi dalam waktu yang cukup lama karena infeksi yang terlalu lama serta pola pengasuhan dan lingkungan. Dampak jika anak terjadi stunting, katanya, yaitu pertumbuhannya akan terganggu serta perkembangan otaknya terganggu dan ketika dewasa dia akan mudah terserang penyakit sehingga keluarga yang berpotensi tersebut dibutuhkan untuk diaudit.

"Audit kasus stunting dilakukan oleh tim teknis dan pakar dari kalangan dokter spesialis anak, dokter spesialis kandungan, psikolog, serta ahli gizi berasal dari sejumlah organisasi pakar. Organisasi pakar yang ikut membantu audit kasus stunting di Riau, yakni Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI), Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia (AIPGI), dan Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsti).

Sedangkan audit kasus stunting --berbasis surveilans rutin atau sumber data lain, khususnya memilah kasus-kasus yang sulit-- dibutuhkan katanya, sebagai bentuk kegiatan identifikasi risiko terjadinya stunting pada kelompok sasaran, calon pengantin, baduta (bawah dua tahun), ibu hamil dan ibu pasca-melahirkan (nifas).

"Karenanya penanganan pada kasus stunting sangat memerlukan surveilans data yang rutin dan memadai sebagai basis seleksi kasus dan kajian," kata Mardalena. Sedangkan keluarga yang memiliki anak yang beresiko stunting, akan diidentifikasi apa kenapa, sehingga diketahui kalau memang stunting apa upaya yang harus dilakukan kedepan, tentu tidak hanya sekedar audit. Untuk itu katanya, pihaknya berharap ada Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) hadir, karena berdasarkan hasil audit stunting itu maka selanjutnya butuh penanganan Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Sosial. "Jadi setelah audit kasus stunting ini tentu akan ada tindak lanjut berikutnya kepada keluarga beresiko stunting dari seluruh pemangku kepentingan tersebut," demikian Mardalena. Plt. Kepala DPPKB Kabupaten Rokan Hulu drg. Leni Sumbari mengatakan kegiatan ini dibiayai BKKBN sehingga audit kasus stunting tahap III bisa dilaksanakan di Kabupaten Rokan Hulu.

<https://riau.antaranews.com/berita/313273/bkkbn-identifikasi-30-keluarga-beresiko-stunting-di-rohul>

DPPKB Rokan Hulu Laksanakan Identifikasi Pengukuran dan Audit Kasus Stunting Tahap III

Adi Candra - 24 November 2022 10:15 WIB



Pekanbaru, Sonora.ID - Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Rokan Hulu melaksanakan Identifikasi Pengukuran dan Audit Kasus Stunting (AKS) Tahap III bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Kabupaten Rokan Hulu bertempat di Aula Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Rokan Hulu pada Rabu (23/11/2022).

PLT Kadis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rokan Hulu drg. Leni Sumbari menyampaikan berkat pembiayaan dari BKKBN, kegiatan AKS Tahap III bisa dilaksanakan di Kabupaten Rokan Hulu. Sebagai Sekretaris TPPS Kabupaten Rokan Hulu bekerjasama dengan OPD terkait serta Camat se Kabupaten Rokan Hulu mengupayakan bagaimana caranya Stunting bisa hilang dari Kabupaten Rokan Hulu.

Kepala Perwakilan (Kaper) BKKBN Provinsi Riau Dra. Mardalena Wati Yulia, M.Si hadir dan menyampaikan masih tingginya anak-anak stunting di Kabupaten Rokan Hulu dari data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021. Anak yang mengalami stunting di Rokan Hulu masih berada di angka 25,8 %, untuk Provinsi Riau Rokan Hulu termasuk yang masih tinggi, dan berharap di Tahun 2024 angka stunting turun menjadi 14%. Lebih lanjut ia menambahkan, stunting tidak bisa diobati stunting hanya bisa dicegah. Seperti yang diketahui stunting disebabkan karna kekurangan

gizi dalam waktu yg cukup lama, karena infeksi yang terlalu lama, pola pengasuhan dan lingkungan.

Dampak jika anak terjadi stunting yaitu pertumbuhan nya akan terganggu, perkembangan otaknya terganggu, dan ketika dewasa akan rentan terhadap penyakit. "Ini lah tugas kita Bapak Ibu karna masih tinggi nya angka stunting, sesuai dengan amanat yang diberikan kepada BKKBN yaitu Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2022, BKKBN salah satu lembaga yang diamanatkan dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting", ucap Kaper.

Ada lima hal yang harus dilakukan, salah satunya adalah melakukan Audit Kasus Stunting. Untuk itu BKKBN tidak bisa bekerja sendiri, karena untuk mengaudit diperlukan ahli, lalu dibentuklah Tim Audit Kasus Stunting, yang mana melibatkan para pakar dan ahli terdiri dari dokter kandungan (SpOG), dokter anak, ahli gizi, dan psikolog.

"Bapak Ibu yang memiliki anak yang beresiko stunting, akan diidentifikasi apa kenapa, sehingga diketahui kalau memang stunting apa langkah kita kedepannya, tentu tidak hanya sekedar audit, untuk itu kami berharap adanya TPPS juga hadir, karena setelah hasil nya nanti perlu ditangani misalnya oleh Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Sosial, jadi setelah audit ini tentu harus ada tindak lanjutnya. Ada 30 keluarga beresiko stunting yang akan diidentifikasi", tambah Kaper. Kaper mengharapkan kerjasama dan konvergensinya, sehingga hasil audit stunting ini bisa ditindaklanjuti dalam upaya Penurunan Angka Stunting di Kabupaten Rokan Hulu. Turut hadir Dinas Kesehatan, Tim Pakar Audit Kasus Stunting, OPD terkait, Satgas dan Technical Assistan Percepatan Penurunan Stunting dan PKB.

<https://www.sonora.id/read/423585836/dppkb-rokan-hulu-laksanakan-identifikasi-pengukuran-dan-audit-kasus-stunting-tahap-iii>

BKKBN identifikasi 30 keluarga beresiko stunting di Rohul

Kamis, 24 November 2022 12:10 WIB



Pekanbaru (ANTARA) - Kepala BKKBN Perwakilan Provinsi Riau Mardalena Wati Yulia menggiatkan identifikasi terhadap 30 keluarga beresiko stunting di Kabupaten Rokan Hulu agar bisa menurunkan cakupan prevalensi stunting di daerah itu yang mencapai 25,8 persen berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021.

"Prevalensi stunting di Rohul masih tinggi jika dibandingkan rata-rata Provinsi Riau sebesar 22,3 persen itu, sehingga diperlukan kerjasama dan konvergensi agar prevalensi stunting di Riau bisa mencapai 14 persen tahun 2024 sesuai target pemerintah," kata Mardalena Wati Yulia, di Rohul, Rabu.

Ia mengatakan itu, pada acara Identifikasi Pengukuran dan Audit Kasus Stunting (AKS) Tahap III bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Kabupaten Rokan Hulu digelar Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Rokan Hulu, di Aula Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Rokan Hulu pada Rabu (23/11).

Mardalena mengatakan, stunting tidak bisa diobati akan tetapi stunting hanya bisa dicegah. Penyebab stunting adalah karena faktor kekurangan gizi dalam waktu yang cukup lama karena infeksi yang terlalu lama serta pola pengasuhan dan lingkungan.

Dampak jika anak terjadi stunting, katanya, yaitu pertumbuhannya akan terganggu serta perkembangan otaknya terganggu dan ketika dewasa dia akan mudah terserang penyakit sehingga keluarga yang berpotensi tersebut dibutuhkan untuk diaudit.

"Audit kasus stunting dilakukan oleh tim teknis dan pakar dari kalangan dokter spesialis anak, dokter spesialis kandungan, psikolog, serta ahli gizi berasal dari sejumlah organisasi pakar.

Organisasi pakar yang ikut membantu audit kasus stunting di Riau, yakni Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI), Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia (AIPGI), dan Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi).

Sedangkan audit kasus stunting --berbasis surveilans rutin atau sumber data lain, khususnya memilah kasus-kasus yang sulit-- dibutuhkan katanya, sebagai bentuk kegiatan identifikasi risiko terjadinya stunting pada kelompok sasaran, calon pengantin, baduta (bawah dua tahun), ibu hamil dan ibu pasca-melahirkan (nifas).

"Karenanya penanganan pada kasus stunting sangat memerlukan surveilans data yang rutin dan memadai sebagai basis seleksi kasus dan kajian," kata Mardalena.

Sedangkan keluarga yang memiliki anak yang beresiko stunting, akan diidentifikasi apa kenapa, sehingga diketahui kalau memang stunting apa upaya yang harus dilakukan kedepan, tentu tidak hanya sekedar audit.

Untuk itu katanya, pihaknya berharap ada Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) hadir, karena berdasarkan hasil audit stunting itu maka selanjutnya butuh penanganan Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Sosial.

"Jadi setelah audit kasus stunting ini tentu akan ada tindak lanjut berikutnya kepada keluarga beresiko stunting dari seluruh pemangku kepentingan tersebut," demikian Mardalena.

Plt. Kepala DPPKB Kabupaten Rokan Hulu drg. Leni Sumbari mengatakan kegiatan ini dibiayai BKKBN sehingga audit kasus stunting tahap III bisa dilaksanakan di Kabupaten Rokan Hulu.

<https://riau.antaranews.com/berita/313273/bkkbn-identifikasi-30-keluarga-beresiko-stunting-di-rohul>

DPPKB Rokan Hulu Laksanakan Identifikasi Pengukuran dan Audit Kasus Stunting Tahap III

Adi Candra - 24 November 2022 10:15 WIB



Pekanbaru, Sonora.ID - Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2022, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Rokan Hulu melaksanakan Identifikasi Pengukuran dan Audit Kasus Stunting (AKS) Tahap III bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Kabupaten Rokan Hulu bertempat di Aula Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Rokan Hulu pada Rabu (23/11/2022).

PLT Kadis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rokan Hulu drg. Leni Sumbari menyampaikan berkat pembiayaan dari BKKBN, kegiatan AKS Tahap III bisa dilaksanakan di Kabupaten Rokan Hulu. Sebagai Sekretaris TPPS Kabupaten Rokan Hulu bekerjasama dengan OPD terkait serta Camat se Kabupaten Rokan Hulu mengupayakan bagaimana caranya Stunting bisa hilang dari Kabupaten Rokan Hulu. Kepala Perwakilan (Kaper) BKKBN Provinsi Riau Dra. Mardalena Wati Yulia, M.Si hadir dan menyampaikan masih tingginya anak-anak stunting di Kabupaten Rokan Hulu dari data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021.

Anak yang mengalami stunting di Rokan Hulu masih berada di angka 25,8 %, untuk Provinsi Riau Rokan Hulu termasuk yang masih tinggi, dan berharap di Tahun 2024 angka stunting turun menjadi 14%. Lebih lanjut ia menambahkan, stunting tidak bisa diobati stunting hanya bisa dicegah. Seperti yang diketahui stunting disebabkan karna

kekurangan gizi dalam waktu yg cukup lama, karena infeksi yang terlalu lama, pola pengasuhan dan lingkungan.

Dampak jika anak terjadi stunting yaitu pertumbuhan nya akan terganggu, perkembangan otaknya terganggu, dan ketika dewasa akan rentan terhadap penyakit. "Ini lah tugas kita Bapak Ibu karna masih tinggi nya angka stunting, sesuai dengan amanat yang diberikan kepada BKKBN yaitu Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2022, BKKBN salah satu lembaga yang diamanatkan dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting", ucap Kaper.

Ada lima hal yang harus dilakukan, salah satunya adalah melakukan Audit Kasus Stunting. Untuk itu BKKBN tidak bisa bekerja sendiri, karena untuk mengaudit diperlukan ahli, lalu dibentuklah Tim Audit Kasus Stunting, yang mana melibatkan para pakar dan ahli terdiri dari dokter kandungan (SpOG), dokter anak, ahli gizi, dan psikolog. "Bapak Ibu yang memiliki anak yang beresiko stunting, akan diidentifikasi apa kenapa, sehingga diketahui kalau memang stunting apa langkah kita kedepannya, tentu tidak hanya sekedar audit, untuk itu kami berharap adanya TPPS juga hadir, karena setelah hasil nya nanti perlu ditangani misalnya oleh Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Sosial, jadi setelah audit ini tentu harus ada tindak lanjutnya. Ada 30 keluarga beresiko stunting yang akan diidentifikasi", tambah Kaper.

Kaper mengharapkan kerjasama dan konvergensinya, sehingga hasil audit stunting ini bisa ditindaklanjuti dalam upaya Penurunan Angka Stunting di Kabupaten Rokan Hulu. Turut hadir Dinas Kesehatan, Tim Pakar Audit Kasus Stunting, OPD terkait, Satgas dan Technical Assistan Percepatan Penurunan Stunting dan PKB.

<https://www.sonora.id/read/423585836/dppkb-rokan-hulu-laksanakan-identifikasi-pengukuran-dan-audit-kasus-stunting-tahap-iii>

Tahap III di Rohul, BKKBN Lakukan Identifikasi Pengukuran dan Audit Kasus Stunting

Parasriau, Jumat, 25 November 2022 12:01:00 AM



ROHUL, PARASRIAU.COM - Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Rokan Hulu melakukan Identifikasi Pengukuran dan Audit Kasus Stunting (AKS) Tahap III bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).

Kegiatan yang digelar di Aula Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), Kabupaten Rokan Hulu turut dihadiri oleh Kepala Perwakilan BKKBN Riau, Dra. Mardalena Wati Yulia didampingi Plt Kepala DPPKB Rohul, drg. Leni Sumbari, Tim Pakar Audit Kasus Stunting, OPD terkait, Satgas dan Technical Assistan Percepatan Penurunan Stunting dan PKB.



Dikatakan Mardalena bahwa saat ini kasus stunting masih tinggi di Riau, khususnya di Kabupaten Rokan Hulu. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021, Rokan Hulu masih berada di angka 25,8 % anak yang mengalami stunting.

"Untuk Provinsi Riau, Rokan Hulu termasuk yang masih tinggi, kita berharap di tahun 2024 angka stunting turun menjadi 14%," harapnya.

Stunting tidak bisa diobati, stunting hanya bisa dicegah. Stunting disebabkan karena faktor kekurangan gizi dalam waktu yang cukup lama karena infeksi yg terlalu lama, pola pengasuhan dan lingkungan. Sehingga berdampak pada pertumbuhannya akan terganggu, perkembangan otaknya terganggu dan ketika dewasa maka akan rentan terhadap penyakit.

"Ada 5 hal yang harus dilakukan, salah satunya adalah melakukan Audit Kasus Stunting. Untuk itu tentu BKKBN tidak bisa bekerja sendiri, karena untuk mengaudit diperlukan ahlinya, lalu dibentuklah Tim Audit Kasus Stunting yang mana melibatkan para pakar dan ahli yang terdiri dari dokter kandungan (SpOG), dokter anak, ahli gizi dan psikolog," ujarnya.

Tidak hanya itu saja, lanjut Mardalena, setelah didapatkan hasil audit kemudian dilakukan identifikasi. "Sehingga diketahui kalau memang stunting apa langkah kita kedepannya, tentu tidak hanya sekedar audit. Saat ini ada 30 keluarga beresiko stunting yang akan diidentifikasi," tambah Kaper.

Ia berharap hasil audit stunting ini bisa ditindaklanjuti dalam upaya penurunan angka stunting di Kabupaten Rokan Hulu.

Sementara itu, dikatakan Leni, menyampaikan bahwa berkat pembiayaan dari BKKBN, kegiatan AKS Tahap III bisa dilaksanakan di Kabupaten Rokan Hulu. Sebagai Sekretaris TPPS Kabupaten Rokan Hulu bekerjasama dengan OPD terkait serta Camat se Kabupaten Rokan Hulu akan terus mengupayakan bagaimana caranya Stunting bisa hilang dari Kabupaten Rokan Hulu," pungkasnya. (pr1)

Editor: M Ikhwan

<https://www.parasriau.com/2022/11/tahap-iii-di-rohul-bkkbn-lakukan.html>

Bicara di Konas IAKMI, BKKBN: Transformasi Penting untuk Percepat Penurunan Stunting

Transformasi sangat dibutuhkan dalam percepatan penurunan stunting. Hal itu di antaranya dapat diwujudkan lewat pendampingan kepada keluarga berisiko stunting, audit kasus stunting yang dilakukan melalui kegiatan penyuluhan dan pemberian bantuan sosial.

Hendra - Nov 25, 2022 - 12:06



RIAUCERDAS.COM - Transformasi sangat dibutuhkan dalam percepatan penurunan stunting. Hal itu di antaranya dapat diwujudkan lewat pendampingan kepada keluarga berisiko stunting, audit kasus stunting yang dilakukan melalui kegiatan penyuluhan dan pemberian bantuan sosial.

"Agar dapat berjalan efektif, konvergen dan terintegrasi, maka diperlukan kerjasama dan kolaborasi yang baik bersama mitra. Harapannya kerjasama dengan mitra kerja dari multi sektor seperti ini akan efektif untuk menghasilkan strategi intervensi yang variatif melalui berbagai elemen di masyarakat," ungkap Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan BKKBN RI, Prof. drh. Muhammad Rizal Martua Damanik, MRepSc, PhD.

Hal itu disampaikan Muhammad Rizal saat menjadi narasumber dengan materi percepatan penurunan stunting saat Kongres Nasional (Konas) XV Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) dan Forum Ilmiah Tahunan VIII (FIT-VIII) yang dilaksanakan dari 22-26 November di Pekanbaru.

Menurut Rizal yang mengangkat materi tentang percepatan penurunan stunting dengan pengendalian perilaku merokok, IAKMI sangat dibutuhkan dalam upaya percepatan penurunan stunting tersebut.

Selain Rizal, dr. Eni Agustina, M.Ph yang merupakan Deputy Keluarga Berencana Kesehatan Reproduksi BKKBN RI juga menjadi narasumber dengan materi evaluasi implementasi peran keluarga dan percepatan penurunan stunting.

Selanjutnya, ada Pimpinan Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena, SSi. Apt sebagai keynote speech. Dalam pemaparannya, Emanuel mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya menjalin sinergi dengan semua pihak agar dapat menurunkan angka stunting sesuai dengan amanat presiden untuk menurunkan angka stunting hingga ke angka 14 persen di tahun 2024.

Strategi percepatan penurunan stunting dilakukan melalui penajaman intervensi melalui pendampingan pra nikah, hamil, dan masa interval. Pelayanan program Bangga Kencana sebagai salah satu pilar dalam upaya meningkatkan kesehatan ibu dan anak terbukti efektif dan hemat biaya dalam mengurangi beberapa penyakit pada ibu dan anak yang tentu pada akhirnya juga akan mendukung penurunan prevalensi stunting.

"Pada intervensi ini dibutuhkan dukungan ahli kesehatan masyarakat serta tenaga kesehatan," ungkap Emanuel.

Untuk diketahui, dalam Konas IAKMI tahun ini, Provinsi Riau ditunjuk sebagai tuan rumah. Ribuan peserta hadir memenuhi Ballroom Hotel Labersa. Peserta yang datang terdiri dari Pengurus Pusat IAKMI, Pengurus dan Anggota IAKMI Daerah dan Cabang seluruh Indonesia.



Kemudian, Pengurus dan Anggota AIPTKMI, BKKBN, Organisasi Profesi, PAMI, ISMKMI, Stakeholder Rumah Sakit di seluruh Indonesia, LSM/NGO, Pemerhati Kesehatan Masyarakat, Pemerintah Pusat dan Daerah, serta perguruan tinggi.

Ketua Pelaksana Konas-XV IAKMI Dr. Hermawan Saputra, SKM., MARS., CICS mengatakan, tahun ini Konas-XV mengusung tema Evaluasi Implementasi Transformasi Sistem Kesehatan Menuju Cakupan Kesehatan Semesta 2030.

Topik dan tema yang disusun ini berkaitan dengan stunting, jaminan kesehatan nasional, isu strategis kebijakan kesehatan yang sedang hangat diperbincangkan.

Sementara, Ketua umum AIPTKMI, Dr. Agustin Kusumayati, M.Sc, P.Hd berharap pertemuan ini menghasilkan ide-ide baru yang segar. "Saya percaya pertemuan kita dalam Kongres Nasional ini merupakan pertemuan yang strategis. Disini kita bertemu, bertukar pikiran, bertukar pengalaman, sehingga harapannya dapat membuahkan ide-ide baru yang segar," ujarnya.

Tidak hanya menyangkut konsep-konsep besar mengenai keprofesian ataupun keilmuan kesehatan masyarakat, tetapi juga terkait usulan-usulan teknis mengenai apa yang harus dilakukan sebagai langkah konkrit untuk menghadapi situasi yang sekarang sedang berkembang dan mengantisipasi masalah yang mungkin muncul dimasa mendatang.

"Saya yakin pertemuan kita ini bisa membawa manfaat terbaik bagi masyarakat nusa dan bangsa kita," ujar Agustin Kusumayati.

Salah satu tujuan yang hendak dicapai melalui kongres ini adalah meningkatkan pengetahuan dan wawasan para praktisi, peneliti, dan pemerhati masalah kesehatan terhadap isu penting yang aktual dan strategis di bidang kesehatan masyarakat dan stunting pun termasuk ke dalamnya.

Sementara itu, Gubernur Riau yang diwakili Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, H. Zainal Arifin, SKM, M.Kes membuka kegiatan secara resmi. Dalam sambutannya, disampaikan bahwa permasalahan kesehatan yang menjadi prioritas tahun ini adalah stunting, angka kematian ibu, angka kematian bayi, Tuberculosis, dan penyakit tidak menular.

"Isu ini tentunya sangat relevan dengan konas ini. Melalui pertemuan ini diharapkan ada inovasi, terobosan, serta lompatan yang sangat cepat untuk mendukung program pemerintah di bidang kesehatan," ujar Zainal. (rls)

<https://www.riaucerdas.com/bicara-di-konas-iakmi-bkkbn-transformasi-penting-untuk-percepat-penurunan-stunting>

Riau Jadi Tuan Rumah Kongres Nasional XV dan Forum Ilmiah Tahunan VIII

Oleh: Tongkulem Siregar - Editor : Femmy Asti Yofani - 25 Nov 2022 - 07:50



KBRN, Pekanbaru : Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) menyelenggarakan Kongres Nasional XV (Konas-XV) dan Forum Ilmiah Tahunan VIII (FIT-VIII) dilaksanakan dari hari Selasa hingga Sabtu mendatang (22-26 November).

Kongres Nasional (Konas) IAKMI yang diadakan tiga tahun sekali ini untuk pertama kali dilaksanakan di Jakarta tahun 1975, sedangkan tahun ini Riau ditunjuk sebagai tuan rumah. Ribuan peserta hadir memenuhi Ballroom Hotel Labersa. Peserta yang datang terdiri dari Pengurus Pusat IAKMI, Pengurus dan Anggota IAKMI Daerah dan Cabang seluruh Indonesia, Pengurus dan Anggota AIPTKMI, BKKBN, Organisasi Profesi, PAMI, ISMKMI, Stakeholder Rumah Sakit di seluruh Indonesia, LSM/NGO, Pemerhati Kesehatan Masyarakat, Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Perguruan Tinggi.

Ketua Pelaksana Konas-XV IAKMI Dr. Hermawan Saputra, SKM., MARS., CICS mengatakan tahun ini Konas-XV IAKMI mengusung tema Evaluasi Implementasi Transformasi Sistem Kesehatan Menuju Cakupan Kesehatan Semesta 2030. Topik dan tema yang disusun ini berkaitan dengan stunting, jaminan kesehatan nasional, isu strategis kebijakan kesehatan yang sedang hangat diperbincangkan.

Selanjutnya Ketua umum AIPTKMI, Dr. Agustin Kusumayati, M.Sc, P.Hd berharap pertemuan ini menghasilkan ide-ide baru yang segar.

“Saya percaya pertemuan kita dalam Kongres Nasional ini merupakan pertemuan yang strategis. Disini kita bertemu, bertukar pikiran, bertukar pengalaman, sehingga harapannya dapat membuahkan ide-ide baru yang segar. Tidak hanya menyangkut konsep-konsep besar mengenai keprofesian ataupun keilmuan kesehatan masyarakat, tetapi juga terkait usulan-usulan teknis mengenai apa yang harus dilakukan sebagai langkah konkrit untuk menghadapi situasi yang sekarang sedang berkembang dan mengantisipasi masalah yang mungkin muncul dimasa mendatang. Saya yakin pertemuan kita ini bisa membawa manfaat terbaik bagi masyarakat nusa dan bangsa kita” jelas Agustin Kusumayati.

Salah satu tujuan yang hendak dicapai melalui kongres ini adalah meningkatkan pengetahuan dan wawasan para praktisi, peneliti, dan pemerhati masalah kesehatan terhadap isu penting yang aktual dan strategis di bidang kesehatan masyarakat dan Stunting pun termasuk kedalamnya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Gubernur Riau yang diwakili oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, H. Zainal Arifin, SKM, M.Kes pada saat memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan secara resmi.

“Permasalahan kesehatan yang menjadi prioritas tahun ini adalah Stunting, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Tuberculosis, dan penyakit tidak menular. Isu ini tentunya sangat relevan dengan konas ini. Melalui pertemuan ini diharapkan ada inovasi, terobosan, serta lompatan yang sangat cepat untuk mendukung program pemerintah di bidang kesehatan,” ujarnya.

Selaku keynote speech, Pimpinan Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena, SSi. Apt mengatakan pihaknya terus berupaya untuk menjalin sinergi dengan semua pihak agar dapat menurunkan angka stunting sesuai dengan amanat presiden untuk menurunkan angka stunting hingga ke angka 14% di tahun 2024.

Strategi Percepatan Penurunan Stunting dilakukan melalui penajaman intervensi melalui pendampingan pra nikah, hamil, dan masa interval. Pelayanan program Bangga Kencana sebagai salah satu pilar dalam upaya meningkatkan kesehatan ibu dan anak terbukti efektif dan hemat biaya dalam mengurangi beberapa penyakit pada ibu dan anak yang tentu pada akhirnya juga akan mendukung penurunan prevalensi stunting. Pada intervensi ini dibutuhkan dukungan ahli kesehatan masyarakat serta tenaga kesehatan.

“Transformasi sangat dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan Stunting, diantaranya pendampingan kepada keluarga beresiko stunting dan audit kasus stunting yang dilakukan melalui kegiatan penyuluhan dan pemberian bantuan sosial. Agar dapat berjalan efektif, konvergen dan terintegrasi, maka diperlukan kerjasama dan kolaborasi yang baik bersama mitra. Harapannya kerjasama dengan mitra kerja dari multisector seperti ini akan efektif untuk menghasilkan strategi intervensi yang variatif melalui berbagai elemen di masyarakat. Dalam hal ini tentunya IAKMI sangat dibutuhkan dalam upaya Percepatan Penurunan Stunting” jelas Deputy Bidang

Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan BKKBN RI, Prof. drh. Muhammad Rizal Martua Damanik, MRepSc, PhD.

Pada kesempatan ini Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan BKKBN RI, Prof. drh. Muhammad Rizal Martua Damanik, MRepSc, PhD turut menjadi narasumber dengan materi percepatan penurunan Stunting dengan pengendalian perilaku merokok dan dr. Eni Agustina, M.Ph Deputi Keluarga Berencana Kesehatan Reproduksi BKKBN RI dengan materi evaluasi implementasi peran keluarga dan percepatan penurunan Stunting. (TS)

<https://rri.co.id/pekanbaru/kesehatan/96298/riau-jadi-tuan-rumah-kongres-nasional-xv-dan-forum-ilmiah-tahunan-viii>

BKKBN Sukseskan Konas IAKMI di Riau Dalam Pencegahan Stunting

Oleh: Tongkulem Siregar - Editor : Femmy Asti Yofani - 24 Nov 2022 - 14:54



KBRN, Pekanbaru : BKKBN RI termasuk Perwakilan BKKBN Provinsi Riau mendukung sekaligus menyukseskan pelaksanaan Kongres Nasional ke-15 dan Forum Ilmiah Tahunan ke-8 Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) yang berlangsung di Pekanbaru, Riau, 24-26 November 2022.

Prof Muhammad Rizal Martua Damanik, Deputy Pelatihan Penelitian dan Pengembangan (Lalitbang) BKKBN RI mewakili Kepala BKKBN RI, Kamis (24/11/2022) usai menyampaikan sambutan didampingi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau, Mardalena Wati Yulia menjelaskan bahwa Kongres Nasional (Konas) sangat strategis.

"Karena perannya yang sangat strategis, maka kami dari BKKBN turut bersama menyukseskan acara ini karena bisa berdialog dengan pengurus daerah dan informasi, kajian dan hasil penelitian yang ada bisa langsung disampaikan kepada masyarakat di seluruh Indonesia," jelasnya.

Dikatakan, Kongres Nasional IAKMI dijadikan BKKBN sebagai ajang untuk menjalin kerjasama sehubungan dengan peran IAKMI yang sangat strategis dalam melaksanakan tugas dan fungsi BKKBN, terutama dalam hal pencegahan dan penurunan stunting.

Secara rinci dijelaskan, bahwa dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting, terbagi dalam dua hal yaitu faktor sensitif dan faktor spesifik.

"Faktor sensitif, menyangkut persoalan pola hidup bersih dan sehat, sanitasi, semuanya ranah IAKMI. Maka dalam upaya percepatan stunting, pengetahuan keahlian sangat signifikan, sehingga kami menerima tawarand dari pengurus IAKMI dan iktui berpartisipasi dalam membahas topik yang dibicarakan, dalam rangka percepatan dan penurunan stunting," urainya.

Sedangkan faktor spesifik kurang gizi, dan lainnya yang merupakan faktor dari kemiskinan, lebih mudah ditangani dari pada faktor sensitif. Faktor sensititu itu 70 persen. Sampai saat ini masyarakat perlu dibekali prilaku hidup bersih dan sehat, bagaimana cara cuci tangan yang baik, mandi dan hal yang sederhana, termasuk BAB, dan BAK masih banyak yang tidak pada tempatnya," tambahnya.

Maka akibat prilaku seperti itu, menimbulkan masalah lain, masyarakat yang menginjak kotoran menjadi cacingan dan infeksi, maka peran sebagai ahli masyarakat, untuk mengkampanyekan kepada masyarakat sehigga target 14 persen sebagaimana ditetapkan pemerintah bisa dicapai.

"Kami BKKBN mendukung dan mengharapkan kolaborasi dalam rangka kesehatan masyarakat. Agar masalah sensitif bisa terasai, dan kolaborasi ini berbicara soal stunting, bukan hanya soal kemiskinan, tetapi pengetahuan," rincinya.

Sehubungan dengan kegiatan IAKMI, maka diharapkan kepada ahli kesekatan masyarakat, untuk berperan lebih aktif dalam rangka mengkonuminasikan faktor sensitif.

"Jadi kami optimis, karena konvergensi dari sebagai penjuru menuju satu titik yang dilakukan maka kita optimis target 14 persen pada tahun 2024 itu bisa dicapai," ungkapnya. (TS)

<https://rri.co.id/pekanbaru/kesehatan/95706/bkkbn-sukseskan-konas-iaelmi-di-riau-dalam-pencegahan-stunting>

Atasi Stunting, BKKBN Kenalkan Menu Makanan Bergizi dari Bahan yang Mudah Dijumpai

Dashat atau Dapur Sehat Atasi Stunting merupakan program yang dilakukan untuk mensosialisasikan makanan-makanan yang bermanfaat dalam mengatasi masalah kurang gizi. Bahkan dari bahan yang sederhana dan banyak dijumpai di sekitar kita. Kali ini, BKKBN menghadirkan Chef Deden Prihandy dari Indonesia Chef Association (ICA).

Hendra - Nov 25, 2022 - 16:10



RIAUCERDAS.COM - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi Riau menggelar kegiatan Pemberdayaan Kelompok Masyarakat di Kampung KB dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting dan Pembinaan Dashat di Kampung KB Dwikora, Jumat (25/11/2022).

Dashat atau Dapur Sehat Atasi Stunting merupakan program yang dilakukan untuk mensosialisasikan makanan-makanan yang bermanfaat dalam mengatasi masalah kurang gizi. Bahkan dari bahan yang sederhana dan banyak dijumpai di sekitar kita. Kali ini, BKKBN menghadirkan Chef Deden Prihandy dari Indonesia Chef Association (ICA).

Dalam pemaparannya yang disertai praktik langsung kepada ibu-ibu yang hadir, Chef Deden memperkenalkan resep puding lumut daun katuk yang bermanfaat untuk memperlancar ASI bagi ibu menyusui. Ada juga menu mostell dori yang merupakan paduan singkong dengan ikan dori (patin). Kedua menu ini bahan bakunya bisa dengan mudah dijumpai di sekitar kita.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau, Mardalena Wati Yulia menjelaskan, program ini merupakan langkah nyata dalam percepatan penurunan stunting di Riau.

Seperti diketahui, katanya, stunting disebabkan tidak hanya oleh kekurangan gizi, tapi juga pola pengasuhan dan lingkungan.

Kekurangan gizi pun tidak hanya dipengaruhi faktor kemiskinan tapi juga ketidaktahuan masyarakat mengolah makanan yang layak dikonsumsi. Sebagai contoh di Riau banyak ikan patin, tapi karena tidak tahu mengolahnya, jadi tidak diberikan kepada anak. Padahal, kandungan dalam ikan patin bagus sekali untuk menambah gizi anak.

Ada juga daun katuk dan ubi yang banyak ditemukan dan harganya murah. Tapi karena, selama ini tidak tahu cara mengolahnya, hanya dijadikan sayur biasa. Padahal, bahan-bahan ini dapat diolah menjadi makanan yang menarik tampilannya, sehat dan enak rasanya.

"Makanya BKKBN dalam acara ini mendatangkan pakar mengolah makanan dan ahli gizi. Dengan harapan, warga memberikan informasi ini kepada seluruh keluarga lainnya. Harapannya, semua pihak berkontribusi dalam percepatan penurunan stunting. Karena kalau hanya BKKBN tidak akan mampu menjangkau masyarakat luas," ujar Mardalena.

Angka stunting di Pekanbaru, tambah dia, memang sudah di bawah angka nasional. Tapi di lapangan, Mardalena mengaku masih melihat ada anak yang mengalami stunting. "Inilah yang harus kita atasi. Kita tidak boleh lengah, harus hati-hati. Jangan sampai ada anak stunting," ungkapnya.

Menurut dia, ketika anak stunting, perkembangan otaknya tidak akan sempurna. Ketika di sekolah pun, akan kesulitan bagi si anak stunting menangkap materi pelajaran. Alhasil, hal ini mempengaruhi masa depannya.

Karena itu, upaya mengatasi stunting perlu dilakukan bersama-sama. Diharapkan, target menurunkan angka stunting menjadi 14 persen di tahun 2024 sebagaimana harapan Presiden Joko Widodo bisa dicapai.

Sementara, Lurah Sukamulya, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Azwar dalam sambutannya berharap seluruh kader KB lebih giat mensukseskan program pemerintah dalam rangka menurunkan angka stunting. "Kami tentu banyak kekurangan di PLKB ini. Mudah-mudahan BKKBN bisa memberikan bantuan," ungkap lurah.

Kita juga mengharapkan lewat kegiatan ini masyarakat mendapatkan pengetahuan lebih. Karena masih ada masyarakat yang belum paham dengan gizi dan upaya penurunan stunting.

Diakui Azwar, di kelurahannya sempat ditemukan dua kasus gejala stunting. Tapi, hal itu bisa diatasi dengan keterlibatan kader KB dan masyarakat setempat. Sehingga, ketika ada anak yang kurang gizi, bisa langsung diintervensi. (*)

<https://www.riaucerdas.com/atasi-stunting-bkkbn-kenalkan-menu-makanan-bergizi-dari-bahan-yang-mudah-dijumpai>

Para ahli kesehatan berkolaborasi cari terobosan turunkan prevalensi stunting

Jumat, 25 November 2022 16:19 WIB



Pekanbaru (ANTARA) - Para ahli kesehatan seluruh Indonesia bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) berkolaborasi mencari ide-ide dan terobosan baru dalam menurunkan prevalensi stunting di Indonesia dan Riau khususnya yang 22,3 persen itu.

Selain membahas stunting, para ahli kesehatan juga membahas persoalan kesehatan lainnya dalam Kongres Nasional XV (Konas-XV) dan Forum Ilmiah Tahunan VIII (FIT-VIII) digelar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) pada Jumat (24/11) - Sabtu (26) di Pekanbaru.

"Saya percaya pertemuan kita dalam Kongres Nasional ini merupakan pertemuan yang strategis. Disini kita bertemu, bertukar pikiran, bertukar pengalaman, sehingga harapannya dapat membuahkan ide-ide baru yang segar," kata Ketua umum AIPTKMI, Dr. Agustin Kusumayati, M.Sc, P.Hd.

Ia mengatakan, selain menyangkut konsep-konsep besar mengenai keprofesian ataupun keilmuan kesehatan masyarakat, tetapi juga terkait usulan-usulan teknis mengenai apa yang harus dilakukan sebagai langkah konkrit untuk menghadapi situasi yang sekarang sedang berkembang dan mengantisipasi masalah yang mungkin muncul dimasa mendatang.

"Saya yakin pertemuan kita ini bisa membawa manfaat terbaik bagi masyarakat nusa dan bangsa kita" jelas Agustin Kusumayati.

Salah satu tujuan yang hendak dicapai melalui kongres ini adalah meningkatkan pengetahuan dan wawasan para praktisi, peneliti, dan pemerhati masalah kesehatan terhadap isu penting yang aktual dan strategis di bidang kesehatan masyarakat dan stunting pun termasuk kedalamnya.

Gubernur Riau yang diwakili oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, H. Zainal Arifin, SKM, M.Kes mengatakan

permasalahan kesehatan yang menjadi prioritas tahun 2022 di Riau adalah stunting, angka kematian ibu, angka kematian bayi, TBC dan penyakit tidak menular.

"Melalui pertemuan ini diharapkan ada inovasi, terobosan, serta lompatan yang sangat cepat untuk mendukung program pemerintah di bidang kesehatan," katanya.

Pembicara utama Konas VX adalah pimpinan Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena, SSi. Apt mengatakan pihaknya terus berupaya untuk menjalin sinergi dengan semua pihak agar dapat menurunkan angka stunting sesuai dengan amanat presiden ke angka 14 persen di tahun 2024.

Strategi percepatan penurunan stunting dilakukan melalui penajaman intervensi melalui pendampingan pra nikah, hamil, dan masa interval.

"Pelayanan program Bangga Kencana sebagai salah satu pilar dalam upaya meningkatkan kesehatan ibu dan anak terbukti efektif dan hemat biaya dalam mengurangi beberapa penyakit pada ibu dan anak yang tentu pada akhirnya juga akan mendukung penurunan prevalensi stunting," katanya.

Pada intervensi ini, katanya, dibutuhkan dukungan ahli kesehatan masyarakat serta tenaga kesehatan. Transformasi sangat dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan Stunting, diantaranya pendampingan kepada keluarga beresiko stunting dan audit kasus stunting yang dilakukan melalui kegiatan penyuluhan dan pemberian bantuan sosial.

"Agar dapat berjalan efektif, konvergen dan terintegrasi, maka diperlukan kerjasama dan kolaborasi yang baik bersama mitra. Harapannya kerjasama dengan mitra kerja dari multisektor seperti ini akan efektif untuk menghasilkan strategi intervensi yang variatif melalui berbagai elemen di masyarakat," katanya.

Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan BKKBN RI, Prof. drh. Muhammad Rizal Martua Damanik, MRepSc, PhD juga menjadi narasumber dengan materi percepatan penurunan Stunting dengan pengendalian perilaku merokok.

Sedangkan dr. Eni Agustina, M.Ph Deputi Keluarga Berencana Kesehatan Reproduksi BKKBN RI dengan materi evaluasi implementasi peran keluarga dan percepatan penurunan stunting.

Pewarta: Frislidia

Editor: Vienty Kumala

<https://riau.antaranews.com/berita/313545/para-ahli-kesehatan-berkolaborasi-cari-terobosan-turunkan-prevalensi-stunting>

BKKBN gandeng Chef Deden masak menu pelancar ASI

Jumat, 25 November 2022 16:52 WIB



Pekanbaru (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Perwakilan Provinsi Riau kembali menggandeng Chef Deden Prihandy dari Indonesia Chef Association (ICA) dalam demo memasak berbahan sederhana yakni "Puding lumut daun katuk" yang bermanfaat untuk memperlancar ASI bagi ibu menyusui.

"Program demo masak ini merupakan langkah kongrit dalam percepatan penurunan stunting di Riau. Penyebab stunting selain pola pengasuhan dan faktor lingkungan juga kekurangan gizi," kata Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau, Mardalena Wati Yulia, di Kampung KB dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting dan Pembinaan Dashat di Kampung KB Dwikora, Pekanbaru, Jumat.

Mardalena Wati Yulia mengatakan, kekurangan gizi pun tidak hanya dipengaruhi faktor kemiskinan tapi juga ketidaktahuan masyarakat mengolah makanan yang layak dikonsumsi.

Sebagai contoh di Riau, katanya, banyak ikan patin, tapi karena tidak tahu mengolahnya, jadi tidak diberikan kepada anak padahal, kandungan omega tiga dan protein dalam ikan patin bagus sekali untuk menambah gizi anak begitu juga dengan daun katuk.

"Daun katuk dan ubi banyak ditemukan dan harganya murah. Tapi karena, selama ini tidak tahu cara mengolahnya, hanya dijadikan sayur biasa. Padahal, bahan-bahan ini dapat diolah menjadi makanan yang menarik tampilannya, sehat dan enak rasanya," katanya.

puding lumut daun katuk

BY CHEF DEDEN PRIHANDY S.PAR., CGSP

Ingredients

- ✓ 55 gram daun kelor yang tua yang segar
- ✓ 4 lembar daun pandan
- ✓ 2 butir telur
- ✓ 1 bungkus agar-agar putih
- ✓ sejumput garam
- ✓ 1/2 sdt vanilla
- ✓ 700 ml atau 3,5 gelas air (me; pakai Takeran gelas belimbing)
- ✓ 150 gram atau 7,5 sdm gula pasir
- ✓ 2 bungkus santan instan kara

cara membuat

1. bersihkan semua bahan
2. blender halus daun katuk dan daun pandan saring abil alar



Karenanya, kata Mardalena lagi, BKKBN mengundang pakar mengolah makanan dan ahli gizi. Dengan harapan, kader pendamping keluarga yang sudah dibekali akan menularkannya kepada seluruh keluarga lainnya sehingga prevalensi stunting di Kota Pekanbaru bisa diturunkan.

Angka stunting di Pekanbaru, tambah dia, memang sudah di bawah angka nasional akan tetapi di lapangan, Mardalena mengaku masih melihat ada anak yang mengalami stunting.

"Inilah yang harus kita atasi, kita tidak boleh lengah, harus hati-hati. Jangan sampai ditemukan lagi anak stunting. Ketika anak stunting, perkembangan otaknya tidak akan sempurna. Ketika di sekolah pun dia akan kesulitan memahami materi pelajaran dan pada akhirnya mempengaruhi masa depannya," katanya.

Karena itu, upaya mengatasi stunting perlu dilakukan bersama-sama dengan harapan target menurunkan angka stunting menjadi 14 persen di tahun 2024 sebagaimana harapan Presiden Joko Widodo bisa dicapai.

Chef Deden Prihandy dari Indonesia Chef Association (ICA) memandu praktek kepada Kader Pendamping Keluarga puding lumut daun katuk yang bermanfaat untuk memperlancar ASI bagi ibu menyusui. Selain itu juga menu mostell dori yang merupakan paduan singkong dengan ikan dori (patin).

"Kedua menu ini bahan bakunya bisa dengan mudah dijumpai di sekitar kita," katanya.

Puding lumut daun katuk

Bahan-bahan

- 55 gram daun katuk yang tua yang segar
- 4 lembar daun pandan
- 2 butir telur
- 1 bungkus agar-agar putih
- sejumput garam
- 1/2 sendok teh vanilla
- 700 ml atau 3,5 gelas air (pakai takaran gelas belimbing)
- 150 gram atau 7,5 sendok makan gula pasir
- dua bungkus santan instan kara.

Cara membuatnya

1. Bersihkan semua bahan
2. blender halus daun katuk dan daun pandan, saring ambil arinya
3. campurkan semua bahan aduk merata
4. masak dengan api kecil selama 2 menit lalu diamkan tanpa diaduk selama 5 menit atau hingga menggumpal
5. setelah masak aduk dan masukkan ke dalam cetakan
6. biarkan dingin dan siap disajikan.

Mostell dori:

bahan-bahan

- 200 gr singkong yang dihaluskan
- 50 gram keju mozzarella potong kota
- 100 gr tepung panir
- 1 butir telur
- 40 gr sauce bbq delmonte
- 1 buah bawang Bombay
- 1 sendok teh garam
- 200 ml minyak goreng
- dori (ikan patin yang difilet) 50 gr cincang halus

Cara membuatnya

1. bersihkan semua bahan
2. kukus ubi dan tumbuk hingga halus
3. tumis bawang bombai dan tambahkan bbq sauce lalu masukkan daging ikan dari yang sudah dicincang halus masak hingga sedikit kering tambahkan garam.
4. lalu bola-bola isi dengan daging dori tadi dan keju mozzarella
5. setelah itu panir kan adonan bola-bola tadi dan siap digoreng.
6. masak hingga matang lalu siap disajikan.

Lurah Sukamulya Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, Azwar berharap seluruh kader KB lebih giat menyukseskan program pemerintah dalam rangka menurunkan prevalensi stunting.

"Melalui praktek mengolah makana bergizi ini diharapkan masyarakat mendapatkan pengetahuan lebih, karena masih ada masyarakat yang belum paham dengan gizi dan upaya penurunan stunting," katanya.

Diakui Azwar, di kelurahannya sempat ditemukan dua kasus gejala stunting. Tapi ini bisa diatasi dengan keterlibatan kader KB /Kade pendamping keluarga dan masyarakat setempat sehingga ketika ada anak yang kurang gizi, bisa langsung diintervensi.

Pewarta: Frislidia

Editor: Vienty Kumala

<https://riau.antaranews.com/berita/313553/bkkbn-gandeng-chef-deden-masak-menu-pelancar-asi>

Stunting Jadi Masalah Prioritas, BKKBN: Diperlukan Kerjasama dan Kolaborasi

Adi Candra - 25 November 2022 20:35 WIB



Pekanbaru, Sonora.ID - Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) menyelenggarakan Kongres Nasional XV (Konas-XV) dan Forum Ilmiah Tahunan VIII (FIT-VIII) dilaksanakan dari hari Selasa hingga Sabtu mendatang (22-26 November).

Kongres Nasional (Konas) IAKMI yang diadakan tiga tahun sekali ini untuk pertama kali dilaksanakan di Jakarta tahun 1975, sedangkan tahun ini Riau ditunjuk sebagai tuan rumah. Ribuan peserta hadir memenuhi Ballroom Hotel Labersa.

Peserta yang datang terdiri dari Pengurus Pusat IAKMI, Pengurus dan Anggota IAKMI Daerah dan Cabang seluruh Indonesia, Pengurus dan Anggota AIPTKMI, BKKBN, Organisasi Profesi, PAMI, ISMKMI, Stakeholder Rumah Sakit di seluruh Indonesia, LSM/NGO, Pemerhati Kesehatan Masyarakat, Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Perguruan Tinggi.

Ketua Pelaksana Konas-XV IAKMI Dr. Hermawan Saputra, SKM., MARS., CICS mengatakan tahun ini Konas-XV IAKMI mengusung tema Evaluasi Implementasi Transformasi Sistem Kesehatan Menuju Cakupan Kesehatan Semesta 2030.

Topik dan tema yang disusun ini berkaitan dengan stunting, jaminan kesehatan nasional, isu strategis kebijakan kesehatan yang sedang hangat diperbincangkan.

Selanjutnya Ketua umum AIPTKMI, Dr. Agustin Kusumayati, M.Sc, P.Hd berharap pertemuan ini menghasilkan ide-ide baru yang segar.

“Saya percaya pertemuan kita dalam Kongres Nasional ini merupakan pertemuan yang strategis. Disini kita bertemu, bertukar pikiran, bertukar pengalaman, sehingga harapannya dapat membuahkan ide-ide baru yang segar. Tidak hanya menyangkut konsep-konsep besar mengenai keprofesian ataupun keilmuan kesehatan masyarakat, tetapi juga terkait usulan-usulan teknis mengenai apa yang harus dilakukan sebagai langkah konkrit untuk menghadapi situasi yang sekarang sedang berkembang dan mengantisipasi masalah yang mungkin muncul dimasa mendatang. Saya yakin pertemuan kita ini bisa membawa manfaat terbaik bagi masyarakat nusa dan bangsa kita” jelas agustin kusumayati.

Salah satu tujuan yang hendak dicapai melalui kongres ini adalah meningkatkan pengetahuan dan wawasan para praktisi, peneliti, dan pemerhati masalah kesehatan terhadap isu penting yang aktual dan strategis di bidang kesehatan masyarakat dan Stunting pun termasuk kedalamnya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Gubernur Riau yang diwakili oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, H. Zainal Arifin, SKM, M.Kes pada saat memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan secara resmi.

<https://www.sonora.id/read/423588445/stunting-jadi-masalah-prioritas-bkkbn-diperlukan-kerjasama-dan-kolaborasi>

Dandim Inhu Dikukuhkan Jadi Bapak Asuh Anak Stunting

Ini bukti bahwa stunting merupakan tanggung jawab semua lintas sektor pemerintah maupun swasta. Rezita berharap, di tahun 2024 bukan hanya dari 23,6 persen menjadi 14 persen. Tetapi harapannya prevalensi stunting di Inhu menjadi 0 persen.

Hendra - Nov 29, 2022 - 20:18



RIAUCERDAS.COM - Angka prevalensi stunting di kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) saat ini berada di 23,6 persen. Angka ini masih tergolong tinggi dan jauh dari target penurunan kasus stunting oleh Presiden RI, Joko Widodo yaitu 14 persen di tahun 2024 mendatang.

Untuk mengatasi masalah itu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) terus berupaya menurunkan angka stunting. Salah satunya melalui Program Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS).

Salah satunya dilakukan oleh Bupati Indragiri Hulu Rezita Meylani Yopi, SE yang mengukuhkan Dandim 0302/Inhu Letkol Kav Dani Prasetyo Wibowo S.Sos M.IP dan, Ketua Persit Kck Cab LI Dim 0302/Inhu Nurul Dani Prasetyo sebagai Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting.

Selain itu, turut dikukuhkan dari PT. Tunggal Perkasa Plantations ikut dalam program BAAS itu. Pengukuhan dilakukan di Aula Desa Sukajadi, Kecamatan Lirik pada Selasa (29/11/2022).

Dalam sambutannya, Rezita berharap upaya penurunan kasus stunting lewat program BAAS tidak hanya berhenti di sini. Tidak hanya dari Dandim 0302/Inhu, Ketua Persit Kck Cab LI Dim 0302/Inhu dan PT. Tunggal Perkasa Plantations saja.

Harapannya, muncul perusahaan-perusahaan lain di Inhu serta Kepala OPD maupun camat sebagai Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting. "Tetapi jangan sampai hanya pengukuhan saja. Tetapi bagaimana aksi kita setelah melakukan pengukuhan ini," ujar Rezita.

Pengukuhan ini, tambahnya, merupakan tindak lanjut telah dikukuhkannya Kepala Staf Angkatan Darat dan Ketua Persit TNI Angkatan Darat Pusat sebagai BAAS. Danrem, Dandim dan seluruh Danramil di seluruh Indonesia juga melakukan hal yang sama.

Ini juga sebagai bukti bahwa stunting merupakan tanggung jawab semua lintas sektor pemerintah maupun swasta. Rezita berharap, di tahun 2024 bukan hanya dari 23,6 persen menjadi 14 persen. Tetapi harapannya prevalensi stunting di Inhu menjadi 0 persen.

Sementara, Kepala Perwakilan BKBN Provinsi Riau Dra Mardalena Wati Yulia, M.Si menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada Dandim 0302/Inhu, Ketua Persit Kck Cab LI Dim 0302/Inhu dan PT. Tungal Perkasa Plantations.

Mardalena yakin dan percaya dengan pengukuhan itu akan memberikan efek dan role model yang baik bagi pemangku kepentingan lainnya. Dia juga berharap pengukuhan ini dapat mempercepat penurunan stunting khususnya di Inhu. (rls)

<https://www.riaucerdas.com/dandim-inhu-dikukuhkan-jadi-bapak-asuh-anak-stunting>

Bupati Indragiri Hulu mengukuhkan Dandim 0302/Inhu dan Ketua Persit Kck Cab LI Dim 0302/Inhu Jadi Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting

Admin Mitra Riau - 30 November 2022



INHU – Diketahui angka Prevalensi Stunting di Indragiri Hulu saat ini berada di angka 23,6% dan angka ini masih jauh dari angka yang ditargetkan Presiden RI yaitu 14% pada tahun 2024 mendatang.

BKKBN terus melakukan upaya untuk dapat menurunkan angka stunting ini, salah satunya melalui Program Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS).

Pada kesempatan ini Bupati Indragiri Hulu Rezita Meylani Yopi, SE mengukuhkan Dandim 0302/Inhu Letkol Kav Dani Prasetyo Wibowo S.Sos M.IP dan, Ketua Persit Kck Cab LI Dim 0302/Inhu Ny. Nurul Dani Prasetyo dan PT. Tunggal Perkasa Plantations sebagai Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting bertempat di Aula Desa Sukajadi, Kecamatan Lirik pada Selasa, (29/11/2022).

Bupati Inhu menyampaikan selamat karena telah dikukuhkannya sebagai Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting Dandim 0302/Inhu, Ketua Persit Kck Cab LI Dim 0302/Inhu dan PT. Tunggal Perkasa Plantations, Beliau berharap tidak hanya berhenti disini saja, tidak hanya dari Dandim 0302/Inhu, Ketua Persit Kck Cab LI Dim 0302/Inhu dan PT. Tunggal Perkasa Plantations saja tetapi harapan Beliau tentunya setelah ini akan muncul perusahaan – perusahaan lain yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu serta Kepala OPD, Camat sebagai Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting, tetapi jangan sampai hanya pengukuhan saja, tetapi bagaimana action kita setelah melakukan pengukuhan ini.

“Diketahui pengukuhan ini merupakan sebagai tindak lanjut telah dikukuhkannya Kepala Staf Angkatan Darat dan Ketua Persit TNI Angkatan Darat Pusat yang kemudian ditindaklanjuti oleh Danrem, Dandim dan seluruh Danramil diseluruh Indonesia”, jelas Bupati.

Ini juga sebagai bukti bahwa stunting merupakan tanggung jawab semua lintas sektor pemerintah maupun swasta.

“Harapan saya, juga di Tahun 2024 bukan hanya dari 23,6% menjadi 14%, tetapi 0% terhadap prevalensi stunting di Kabupaten Indragiri Hulu,” jelasnya lagi.

Ditempat yang sama, Kepala Perwakilan BKBN Provinsi Riau Dra. Mardalena Wati Yulia, M.Si menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada Dandim 0302/Inhu, Ketua Persit Kck Cab LI Dim 0302/Inhu dan PT. Tunggal Perkasa Plantations yang telah berkenan dikukuhkan sebagai Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting Kabupaten Indragiri Hulu.

“Saya yakin dan percaya dengan pengukuhan Bapak dan Ibu akan memberikan efek dan role model yang baik bagi pemangku kepentingan lainnya,” ujarnya.

Dirinya berharap semoga pengukuhan ini dapat mempercepat penurunan stunting khususnya di Kabupaten Indragiri Hulu dan umumnya Provinsi Riau. (Gi)

<https://mitrariau.id/bupati-indragiri-hulu-mengukuhkan-dandim-0302-inhu-dan-ketua-persit-kck-cab-li-dim-0302-inhu-jadi-bapak-dan-bunda-asuh-anak-stunting/>

Bupati Indragiri Hulu Resmikan Balai Penyuluh KB Kecamatan Lirik dan Pasisr Peny

Admin Mitra Riau - 30 November 2022



INHU – Bupati Indragiri Hulu Rezita Meylani Yopi, SE meresmikan Balai Penyuluh KB Kecamatan Lirik dan Kecamatan Pasisr Peny, bertempat di GOR Jiro Desa Sukajadi, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu pada Selasa, (29/11/2022).

Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Inhu, Joni Maryanto, S.Pi, M.Si dalam sambutannya menyampaikan Balai Penyuluh KB adalah bangunan yang terletak diwilayah kecamatan yang berfungsi sebagai tempat beraktifitas.

“Terutama dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi serta sebagai pusat pengendalian operasional Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di lini lapangan dalam upaya meningkatkan pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana dan melaksanakan kegiatan prioritas yang mendukung terciptanya target atau sasaran program Bangga Kencana,” ujarnya.

Selanjutnya, keberadaan Balai Penyuluh KB di Kabupaten Indragiri Hulu diharapkan dapat mendukung kelancaran Program Bangga Kencana di Kabupaten Indragiri Hulu.

“Selain itu keberadaan Balai Penyuluh KB ini juga dimaksudkan agar dapat menambah motivasi dan semangat para Penyuluh KB, Petugas Lapangan KB, Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dan motivator KB lainnya untuk semakin giat melaksanakan tugas dan pengabdianya kepada masyarakat sehingga Program Bangga Kencana benar-benar dapat dirasakan manfaatnya,” tambahnya lagi.

Ditambahkan, Kabupaten Indragiri Hulu saat ini sudah memiliki 14 Balai Penyuluh KB yaitu Balai Penyuluh KB Kecamatan Sungai Lala (2016), Rengat Barat dan Rakit Kulim (2017), Batang Cenaku, Peranap dan Lubuk Batu Jaya (2018), Batang Peranap (2019), Kelayang dan Batang Gangsal (2020), Kuala Cenaku, Siberida, Rengat (2021), Lirik dan Pasir Penyu (2022). Pembangunan Balai Penyuluhan KB ini berasal dari BKKBN. BKKBN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Keluarga Berencana Fisik Tahun Anggaran 2016 hingga Tahun 2022.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau Dra. Mardalena Wati Yulia, M.Si mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Bupati beserta jajaran.

“Dimana Bupati Inhu selalu memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Program Bangga Kencana termasuk pengadaan – pengadaan sarana dan prasarana mendukung suksesnya Program Bangga Kencana,” tegasnya.

Bupati Inhu dalam sambutannya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada BKKBN Perwakilan Provinsi Riau dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Indragiri Hulu serta pihak ketiga, yang telah merealisasikan dan menyelesaikan pembangunan Balai Penyuluh KB ini.

“Dengan diresmikannya Balai Penyuluh KB Kecamatan Lirik Dan Pasir Penyu ini, lengkaplah sudah keberadaan Balai Penyuluh KB di 14 Kecamatan Kabupaten Indragiri Hulu,” ujar Bupati.

Bupati didampingi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau, juga menyerahkan bantuan asupan gizi terhadap anak yang beresiko stunting dari Pemkab Inhu dan PT. Tunggal Perkasa Plantations, penyerahan BKB KIT Stunting dan BKB KIT Siap Nikah, dan Kendaraan Operasional Balai Penyuluh KB.

“Dan yang paling penting, keberadaan balai penyuluh KB ini benar-benar dimanfaatkan sebagai penunjang kinerja dan sarana serta mendukung keberhasilan Program Pembangunan Bangga Kencana dimana salah satu upaya prioritasnya adalah percepatan penurunan stunting,” harap Bupati.

Dilanjutkan dengan Pengguntingan Pita Peresmian Balai dan Penandatanganan Prasasti Balai oleh Bupati Inhu.

Turut hadir dalam acara tersebut Asisten Perekonomian dan Kesra H. Syahrudin, S.Sos, MT, jajaran Forkopimda, Kepala OPD, Pimpinan BUMN, BUMD, Camat, Kepala Desa, tokoh masyarakat dan tamu undangan lainnya.(Gi)

<https://mitrariau.id/bupati-indragiri-hulu-resmikan-balai-penyuluh-kb-kecamatan-lirik-dan-pasir-penyu/>

BKKBN Riau menggelar kegiatan Audit Kasus Stunting Tahap II di Kabupaten Rokan Hilir

Admin Mitra Riau - 30 November 2022



INHU – Sebagai bentuk Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2022, DP2KBP3A Kabupaten Rokan Hilir melaksanakan Audit Kasus Stunting (AKS) Tahap II bertempat di Aula Gedung Wanita Kabupaten Rokan Hilir pada Selasa, (29/11/2022).

Kabid Dalduk, Penyuluhan dan Penggerakan DP2KBP3A Kabupaten Rokan Hilir, dr. Dhona Fitria Sari mengatakan kegiatan ini merupakan lanjutan dari AKS pertama yang telah dilaksanakan pada 10 Agustus lalu. Dikatakan, hari ini akan dilakukan identifikasi kepada 5 sasaran yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui dan balita.

“Guna mengidentifikasi 5 sasaran ini, kita datangkan dr spesialis Obgyn (Kandungan) dan Psikolog yang tergabung kedalam tim pakar AKS Kabupaten Rokan Hilir untuk selanjutnya diungkap permasalahan dan solusi pencegahannya” katanya.

Dirinya juga menyampaikan bahwa pihaknya sudah bekerjasama dengan Dinas terkait dan Camat se Kabupaten Rokan Hilir untuk mengupayakan bagaimana caranya angka Stunting di Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2024 bisa turun hingga 14% sesuai dengan instruksi Presiden Jokowi.

Koordinator Bidang KBKR Supriyadi, S.Pd, M.Sc mengatakan berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021, Rokan Hilir merupakan kabupaten dengan angka prevalensi tertinggi di Provinsi Riau yakni 29,7 %.

“Angka Stunting yang tinggi itu yang menjadi tugas kita bersama. Untuk itu penting dilaksanakan Audit untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi Stunting pada kelompok sasaran. Diharapkan hasil audit ini nantinya dapat ditindaklanjuti. Dalam hal ini perlu sinergi dan konvergensi dari semua pihak”, ucap Supriyadi.

Dari identifikasi dan penyampaian laporan langsung oleh TPK Kabupaten Rokan Hilir didapati hasil bahwa balita beresiko Stunting yang menjadi sasaran ini memiliki tinggi dan berat badan $>-2SD$, ibu hamil yang berusia 18 tahun dan Ibu menyusui yang menderita KEK (Kurang Energi Kronis).

Menyikapi hal tersebut, dr. M. Sukri, Sp.OG memberikan beberapa saran terkait permasalahan yang dijumpai pada ibu hamil.

“Dari data yang diberikan terlihat bahwa penambahan BB pada ibu hamil kurang, hal ini tentunya disebabkan oleh asupan gizi pada ibu tersebut saat hamil tidak Adekuat. Oleh karena itu diharapkan ada pemberian pendampingan terkait edukasi nutrisi pada ibu hamil. Selain itu, pemeriksaan kehamilan (USG) juga diperlukan guna mengetahui perkembangan janin,” jelasnya.

Dari sudut pandang psikologi, Diwana Lestari, S.Psi mengatakan mental ibu hamil dan ibu menyusui juga tidak boleh diabaikan.

“Mohon kepada TPK untuk memperhatikan kondisi mental ibu hamil dan ibu menyusui juga. Karena stress akan mengakibatkan ibu mengalami Baby Blues, dan Mood Swing yang akan mempengaruhi produksi ASI. Untuk mengantisipasi hal tersebut kita bisa memberikan edukasi ilmu parenting kepada ibu tersebut” ucapnya.

Turut hadir pada kegiatan ini Dinas Kesehatan, Tim Pakar Audit Kasus Stunting, OPD terkait, Satgas dan Technical Assistan Percepatan Penurunan Stunting dan PKB Kabupaten Rokan Hilir. (Gi)

<https://mitrariau.id/bkkbn-riau-menggelar-kegiatan-audit-kasus-stunting-tahap-ii-di-kabupaten-rokan-hilir/>

Dandim 0302/Inhu dan Ketua Persit Kck Cab LI Dim 0302/Inhu Dikukuh sebagai Bapak dan Bunda Asuh Anak

Rabu, 30 November 2022 - 05:44 WIB



RIAUMANDIRI.CO - Diketahui angka Prevalensi Stunting di Indragiri Hulu saat ini berada di angka 23,6% dan angka ini masih jauh dari angka yang ditargetkan Presiden RI yaitu 14% pada tahun 2024 mendatang.

BKKBN terus melakukan upaya untuk dapat menurunkan angka stunting ini, salah satunya melalui Program Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS).

Pada kesempatan ini Bupati Indragiri Hulu Rezita Meylani Yopi, SE mengukuhkan Dandim 0302/Inhu Letkol Kav Dani Prasetyo Wibowo S.Sos M.IP dan, Ketua Persit Kck Cab LI Dim 0302/Inhu Ny. Nurul Dani Prasetyo dan PT. Tunggal Perkasa Plantations sebagai Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting bertempat di Aula Desa Sukajadi, Kecamatan Lirik pada Selasa (29/11/2022).

Bupati Inhu menyampaikan selamat karena telah dikukuhkannya sebagai Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting Dandim 0302/Inhu, Ketua Persit Kck Cab LI Dim 0302/Inhu dan PT. Tunggal Perkasa Plantations, Beliau berharap tidak hanya berhenti disini saja, tidak hanya dari Dandim 0302/Inhu, Ketua Persit Kck Cab LI Dim 0302/Inhu dan PT. Tunggal Perkasa Plantations saja tetapi harapan Beliau tentunya setelah ini akan muncul perusahaan-perusahaan lain yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu serta Kepala OPD, Camat sebagai Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting, tetapi jangan sampai hanya pengukuhan saja, tetapi bagaimana action kita setelah melakukan pengukuhan ini.

Ditambahkan Bupati Inhu, diketahui pengukuhan ini merupakan sebagai tindak lanjut telah dikukuhkannya Kepala Staf Angkatan Darat dan Ketua Persit TNI Angkatan Darat Pusat yang kemudian ditindaklanjuti oleh Danrem, Dandim dan seluruh Danramil diseluruh Indonesia.

Ini juga sebagai bukti bahwa stunting merupakan tanggung jawab semua lintas sektor pemerintah maupun swasta. Harapan beliau juga di Tahun 2024 bukan hanya dari 23,6% menjadi 14%, tetapi 0% harapannya terhadap prevalensi stunting di Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditempat yang sama, Kepala Perwakilan BKBN Provinsi Riau Dra. Mardalena Wati Yulia, M.Si menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada Dandim 0302/Inhu, Ketua Persit Kck Cab LI Dim 0302/Inhu dan PT. Tunggal Perkasa Plantations yang telah berkenan dikukuhkan sebagai Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting Kabupaten Indragiri Hulu.

Beliau yakin dan percaya dengan pengukuhan Bapak dan Ibu akan memberikan efek dan role model yang baik bagi pemangku kepentingan lainnya.

Beliau berharap semoga pengukuhan ini dapat mempercepat penurunan stunting khususnya di Kabupaten Indragiri Hulu dan umumnya Provinsi Riau. (nie)

Reporter: Renny Rahayu

Editor: Nurul Atia

<https://www.riaumandiri.co/read/detail/103637/dandim-0302inhu-dan-ketua-persit-kck-cab-li-dim-0302inhu-dikukuh-sebagai-bapak-dan-bunda-asuh-anak-stunting>

Bupati Inhu Meresmikan Balai Penyuluh KB Kecamatan Lirik dan Pasir Penyu

Oleh: Tongkulem Siregar - Editor : Femmy Asti Yofani - 30 Nov 2022 - 08:09



KBRN, Pekanbaru : Bupati Indragiri Hulu Rezita Meylani Yopi, SE meresmikan Balai Penyuluh KB Kecamatan Lirik dan Kecamatan Pasir Penyu, bertempat di GOR Jiro Desa Sukajadi, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu pada hari Selasa tanggal 29 November 2022.

Plt. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Indragiri Hulu, Joni Maryanto, dalam sambutannya menyampaikan Balai Penyuluh KB adalah bangunan yang terletak diwilayah kecamatan yang berfungsi sebagai tempat beraktifitas dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi serta sebagai pusat pengendalian operasional Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di lini lapangan dalam upaya meningkatkan pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana dan melaksanakan kegiatan prioritas yang mendukung terciptanya target atau sasaran program Bangga Kencana.

Selanjutnya, keberadaan Balai Penyuluh KB di Kabupaten Indragiri Hulu diharapkan dapat mendukung kelancaran Program Bangga Kencana di Kabupaten Indragiri Hulu, selain itu keberadaan Balai Penyuluh KB ini juga dimaksudkan agar dapat menambah motivasi dan semangat para Penyuluh KB, Petugas Lapangan KB, Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) dan motivator KB lainnya untuk semakin giat melaksanakan tugas dan pengabdianya kepada masyarakat sehingga Program Bangga Kencana benar-benar dapat dirasakan manfaatnya.

Ditambahkannya, Kabupaten Indragiri Hulu saat ini sudah memiliki 14 Balai Penyuluh KB yaitu Balai Penyuluh KB Kecamatan Sungai Lala (2016), Rengat Barat dan Rakit Kulim (2017), Batang Cenaku, Peranap dan Lubuk Batu Jaya (2018), Batang Peranap (2019), Kelayang dan Batang Gangsal (2020), Kuala Cenaku, Siberida, Rengat (2021), Lirik dan Pasir Penyu (2022). Pembangunan Balai Penyuluhan KB ini berasal dari BKKBN. BKKBN melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Sub Bidang Keluarga Berencana Fisik Tahun Anggaran 2016 hingga Tahun 2022.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau Dra. Mardalena Wati Yulia, M.Si mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Ibu Bupati beserta jajaran yang selalu memberikan dukungan terhadap pelaksanaan Program Bangga Kencana termasuk pengadaan-pengadaan sarana dan prasarana mendukung suksesnya Program Bangga Kencana.

Bupati Inhu dalam sambutannya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada BKKBN Perwakilan Provinsi Riau dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Indragiri Hulu serta pihak ketiga, yang telah merealisasikan dan menyelesaikan pembangunan Balai Penyuluh KB ini.

"Diresmikannya Balai Penyuluh KB Kecamatan Lirik Dan Pasir Penyu ini, lengkaplah sudah keberadaan Balai Penyuluh KB di 14 Kecamatan Kabupaten Indragiri Hulu. Dan yang paling penting, keberadaan balai penyuluh KB ini benar-benar dimanfaatkan sebagai penunjang kinerja dan sarana serta mendukung keberhasilan Program Pembangunan Bangga Kencana dimana salah satu upaya prioritasnya adalah percepatan penurunan stunting," harap Bupati, dalam siaran pers, Rabu (30/11/2022).

Selanjutnya Bupati didampingi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Riau menyerahkan bantuan asupan gizi terhadap anak yang beresiko stunting dari Pemkab Inhu dan PT. Tunggal Perkasa Plantations, penyerahan BKB KIT Stunting dan BKB KIT Siap Nikah, dan Kendaraan Operasional Balai Penyuluh KB.

Dilanjutkan dengan Pengguntingan Pita Peresmian Balai dan Penandatanganan Prasasti Balai oleh Bupati Inhu.

Turut hadir dalam acara tersebut Asisten Perekonomian dan Kesra H. Syahrudin, S.Sos, MT, jajaran Forkopimda, Kepala OPD, Pimpinan BUMN, BUMD, Camat, Kepala Desa, tokoh masyarakat dan tamu undangan lainnya. (TS)

<https://rri.co.id/pekanbaru/kesehatan/100309/bupati-inhu-meresmikan-balai-penyuluh-kb-kecamatan-lirik-dan-pasir-penyu>

Dandim Inhu dan Ketua Persit Dikukuhkan sebagai BAAS

RIAU Rabu, 30 November 2022 - 10:16 WIB



PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Pengukuhan Bapak Asuh kepada Letkol Kav Dani Prasetyo Wibowo SSos MIP dan Ny Nurul Dani Prasetyo selaku Ketua Persit KCK Cab LI DIM 0302/Inhu dikukuhkan sebagai Bunda Asuh Anak Stunting Indragiri Hulu 2022.

Pengukuhan Bapak Asuh dan Bunda Asuh Anak Stunting tersebut dilakukan pemasangan selempang Bapak dan Bunda Asuh Stunting secara langsung oleh Bupati Indragiri Hulu Rezita Meylani Yopi di Gedung Serbaguna Jiro Kecamatan Lirik, Selasa (29/11) disaksikan Ketua Perwakilan BKKBN Riau Mardalena Wati Yulia dan fokopimda.

Setelah dikukuhkan sebagai Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting, Dandim Dani Prasetyo Wibowo mengatakan, pihaknya akan segera berkoordinasi pemerintah dengan instansi terkait guna merumuskan strategi terbaik. Mengangkat dan membuat program guna mempercepat proses penurunan stunting di wilayah kerjanya khususnya Indragiri Hulu.

“Maka kami mengajak untuk selalu berkoordinasi dengan baik. Menyusun mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan tindakan di lapangan dalam rangka mengatasi penurunan angka stunting di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu,” kata Dani.

Dandim menambahkan, pengukuhan Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting kepada dirinya merupakan bentuk dukungan terhadap upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Inhu.

“Stunting merupakan gangguan pertumbuhan anak. Anak tidak tumbuh tinggi seperti anak seusianya akibat kekurangan gizi jelas ini kurang baik dalam tumbuh kembang anak,” ujar Dandim.

Untuk dapat mengurangi jumlah anak yang masuk dalam kategori stunting, tentu ke depan nantinya Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting melakukan pendampingan dan pengawasan, memberikan bantuan dalam pemenuhan kebutuhan gizi. “Saling koordinasi dan kerja sama dalam penanganan stunting agar anak tersebut bisa tumbuh dan berkembang,” terang Dandim.

Sementara Bupati Inhu Rezita Meylani Yopi SE mengatakan, dengan dikukuhkan yang Dandim Inhu dan Ketua Persit sebagai Bapak Asuh dan Bunda Asuh Anak stunting yang dicanangkan dapat menekan angka anak stunting hingga untuk ke depannya Inhu menjadi zero anak stunting tentunya diperlukan action di lapangan.

“Artinya, seluruh jajaran aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Inhu dan seluruh forkopimda masing masing memiliki peran penting dalam penanganan anak stunting,” ungkapnya.

Hal tersebut dimaksudkan agar para orangtua yang memiliki anak stunting bisa mudah berkomunikasi dengan Bapak Asuh dan Bunda Asuh yakni orang tua disebelahnya. orangtua asuh masing-masing. (eca)

<https://riaupos.jawapos.com/riau/30/11/2022/288995/dandim-inhu-dan-ketua-persit-dikukuhkan-sebagai-baas.html>

Bupati Inhu Kukuhkan Dandim 0302 dan Ketua Persit Inhu Sebagai BAAS

Oleh: Tongkulem Siregar - Editor: Femmy Asti Yofani - 29 Nov 2022 - 19:21



KBRN, Pekanbaru : Bupati Indragiri Hulu (Inhu), Rezita Meylani Yopi mengukuhkan Dandim 0302/Inhu Letkol Kav Dani Prasetyo Wibowo S.Sos M.IP dan Ketua Persit Kck Cab LI Dim 0302/Inhu Ny. Nurul Dani Prasetyo sebagai Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS), Selasa (29/11/2022) di Aula Desa Sukajadi, Kecamatan Lirik, Kabupaten Indragiri Hulu.

Pengukuhan dilakukan untuk menurunkan angka stunting di Inhu karena angka Prevalensi Stunting di Indragiri Hulu saat ini berada di angka 23,6% dan angka ini masih jauh dari angka yang ditargetkan Presiden RI yaitu 14% pada tahun 2024 mendatang.

Dalam siaran pers, Selasa (29/11/2022) disebutkan, BKKBN terus melakukan upaya untuk dapat menurunkan angka stunting ini, salah satunya melalui Program Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting (BAAS). Sehingga Bupati Indragiri Hulu Rezita Meylani Yopi, SE mengukuhkan Dandim 0302/Inhu Letkol Kav Dani Prasetyo Wibowo S.Sos M.IP dan, Ketua Persit Kck Cab LI Dim 0302/Inhu Ny. Nurul Dani Prasetyo dan PT. Tunggal Perkasa Plantations sebagai Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting.

Bupati Inhu menyampaikan selamat karena telah dikukuhkannya sebagai Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting Dandim 0302/Inhu, Ketua Persit Kck Cab LI Dim 0302/Inhu dan PT. Tunggal Perkasa Plantations. Beliau berharap tidak hanya berhenti disini saja, tidak hanya dari Dandim 0302/Inhu, Ketua Persit Kck Cab LI

Dim 0302/Inhu dan PT. Tunggal Perkasa Plantations saja tetapi tentunya setelah ini akan muncul perusahaan-perusahaan lain yang ada di Kabupaten Indragiri Hulu serta Kepala OPD, Camat sebagai Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting.

"Tetapi jangan sampai hanya pengukuhan saja, tetapi bagaimana action kita setelah melakukan pengukuhan ini," katanya.

Ditambahkan Bupati Inhu, pengukuhan ini merupakan sebagai tindak lanjut telah dikukuhkannya Kepala Staf Angkatan Darat dan Ketua Persit TNI Angkatan Darat Pusat yang kemudian ditindaklanjuti oleh Danrem, Dandim dan seluruh Danramil diseluruh Indonesia. Ini juga sebagai bukti bahwa stunting merupakan tanggung jawab semua lintas sektor pemerintah maupun swasta. Harapan beliau juga di Tahun 2024 bukan hanya dari 23,6% menjadi 14%, tetapi 0% harapannya terhadap prevalensi stunting di Kabupaten Indragiri Hulu.

Ditempat yang sama, Kepala Perwakilan BKBN Provinsi Riau Dra. Mardalena Wati Yulia, M.Si menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada Dandim 0302/Inhu, Ketua Persit Kck Cab LI Dim 0302/Inhu dan PT. Tunggal Perkasa Plantations yang telah berkenan dikukuhkan sebagai Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting Kabupaten Indragiri Hulu.

"Saya yakin dan percaya dengan pengukuhan bapak dan Ibu menjadi bapak dan bunda anak asuh stunting akan memberikan efek dan role model yang baik bagi pemangku kepentingan lainnya. Saya juga berharap semoga pengukuhan ini dapat mempercepat penurunan stunting khususnya di Kabupaten Indragiri Hulu dan umumnya Provinsi Riau," katanya. (TS)

<https://rri.co.id/pekanbaru/kesehatan/100000/bupati-inhu-kukuhkan-dandim-0302-dan-ketua-persit-inhu-sebagai-baas>

Bupati Inhu resmikan penggunaan Balai Penyuluhan KB

Selasa, 29 November 2022 17:16 WIB



"Balai Penyuluh KB dapat difungsikan dengan optimal, dalam rangka mensukseskan program nasional"

Rengat (ANTARA) - Bupati Indragiri Hulu, Riau Rezita Meylani Yopi meresmikan Balai Penyuluhan Keluarga Berencana di dua kecamatan di GOR Desa Sukajadi Lirik pada Selasa siang.

Yakni, Lirik dan Pasir Penyu sekaligus mengukuhkan Bapak dan Bunda Asuh Stunting (B-BAS) Inhu.

"Sebagai Napak Asuh Stunting Inhu adalah Komandan Kodim 0302 dan perwakilan PT Tunggal Perkasa Plantation," katanya di Rengat.

Sedangkan Bunda Asuh Stunting (B-SS) adalah Ketua Persit Kartika Candra Kirana Cabang Kodim 0302.

Sebagai Bupati Inhu, dirinya mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi kepada BKKBN Perwakilan Provinsi Riau dan semua pihak terkait yang telah menyelesaikan pembangunan Balai Penyuluh KB.

Dalam sambutan, Plt Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Inhu Joni Maryanto mengatakan, keberadaan balai penyuluh KB diharapkan dapat membantu program Pembangunan keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) di Inhu.

"Selain itu, dapat menambah motivasi para penyuluh KB dalam bertugas," ujarnya.

Sehingga, program KB dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Dan, Joni juga menyebutkan, saat ini Inhu sudah memiliki 14 BP - KB yang tersebar di 14 kecamatan.

Sedangkan, Kepala BKKBN Provinsi Riau Mardalena Wati Yulia dalam pidatonya menyebutkan, sangat mengapresiasi bupati beserta jajaran yang selalu memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program Bangga Kencana.

"Termasuk pengadaan sarana dan dalam rangka mensukseskan program tersebut," sebutnya.

Sesuai dengan amanat Pepres No. 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, maka menjadi tugas bersama mensukseskan program nasional tersebut.

Pewarta: Asripilyadi

Editor: Riski Maruto

<https://riau.antaranews.com/berita/314189/bupati-inhu-resmikan-penggunaan-balai-penyuluhan-kb>

PENANGANAN DI TINGKAT DAERAH PERLU DIOPTIMALKAN

Kamis 24 November 2022, 15:01 WIB | Kategori: Metropolis



Penanganan Stunting di Tingkat Daerah, perlu lebih di Optimalkan, melalui berbagai Program. Hal ini sesuai dengan hasil Penelitian, terkait desiminasi Studi Kasus dan Pembelajaran baik Stunting.

<https://www.riatelevisi.com/berita-penanganan-di-tingkat-daerah-perlu-dioptimalkan.html>

BKKBN PROVINSI RIAU DAN TPPS ROHUL AUDIT STUNTING

Kamis 24 November 2022, 20:22 WIB | Kategori: Kab. ROHUL



BKKBN Provinsi Riau, bersama Tim Percepatan Penurunan Angka Stunting, (TPPS) Kabupaten Rokan Hulu, menggelar pengukuran dan audit kasus stunting tahap 3, di Kabupaten Rokan Hulu. Sebagai sampel, pemantauan keluarga beresiko Stunting, dihadirkan 25 orang Ibu Hamil, dan Balita.

<https://www.riautelevi.com/berita-bkkbn-provinsi-riau-dan-tpps-rohul-audit-stunting.html>

PENANGANAN DI TINGKAT DAERAH PERLU DIOPTIMALKAN

RIAUTV



Penanganan Stunting di Tingkat Daerah, perlu lebih di Optimalkan , melalui berbagai Program . Hal ini sesuai dengan hasil Penelitian, terkait desiminasi Studi Kasus dan Pembelajaran baik Stunting.

https://www.youtube.com/watch?v=fGXy53_GNEU

Identifikasi Pengukuran dan Audit Kasus Stunting di Rohul

RIAU - Rabu, 23 November 2022 - 13:07 WIB



PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Dalam rangka pelaksanaan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting tingkat Kabupaten Rokan Hulu 2022, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Rokan Hulu melaksanakan Identifikasi Pengukuran dan Audit Kasus Stunting (AKS) Tahap III bersama Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Aula Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rokan Hulu, Rabu (23/11).

Plt. Kepala DPPKB Rokan Hulu dg Leni Sumbari mengantarkan kegiatan ini menyampaikan berkat pembiayaan dari BKKBN, kegiatan AKS Tahap III bisa dilaksanakan di Kabupaten Rokan Hulu. Sebagai Sekretaris TPPS Kabupaten Rokan Hulu bekerjasama dengan OPD terkait serta Camat se Kabupaten Rokan Hulu mengupayakan bagaimana caranya Stunting bisa hilang dari Kabupaten Rokan Hulu.

Kepala Perwakilan BKKBN Riau Dra Mardalena Wati Yulia MSi hadir dan menyampaikan kita masih dihadapi masih tingginya anak-anak stunting di Kabupaten Rokan Hulu dari data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2021, Rokan Hulu masih berada di angka 25,8 % anak yang mengalami stunting, untuk Provinsi Riau Rokan Hulu termasuk yang masih tinggi.

"Kita berharap di Tahun 2024 angka stunting turun menjadi 14%. Selanjutnya, stunting tidak bisa diobati, stunting hanya bisa dicegah," katanya.

Diketahui bersama stunting disebabkan karna faktor kekurangan gizi dalam waktu yg cukup lama karna infeksi yg terlalu lama, pola pengasuhan dan lingkungan. Dampak jika anak terjadi stunting yaitu pertumbuhan nya akan terganggu, perkembangan otaknya terganggu, ketika dewasa dia akan rentan terhadap penyakit.

"Ini lah tugas kita Bapak/Ibu karna masih tinggi nya angka stunting, sesuai dengan amanat yang diberikan kepada BKKBN yaitu Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2022, BKKBN salah satu lembaga yang diamanatkan dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting", ucap Kaper BKBBN Riau, Mardalena Wati Yulia.

Ada 5 hal yang harus dilakukan, salah satunya adalah melakukan Audit Kasus Stunting. Untuk itu tentu BKKBN tidak bisa bekerja sendiri, karna untuk mengaudit diperlukan ahlinya, lalu dibentuklah Tim Audit Kasus Stunting, yang mana melibatkan para pakar dan ahli terdiri dari dokter kandungan (SpOG), dokter anak, ahli gizi, dan psikolog.

"Bapak/Ibu yang memiliki anak yang beresiko stunting, akan diidentifikasi apa kenapa, sehingga diketahui kalau memang stunting apa langkah kita kedepannya, tentu tidak hanya sekedar audit, untuk itu kami berharap adanya TPPS juga hadir, karena setelah hasil nya nanti perlu ditangani misalnya oleh Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Sosial, jadi setelah audit ini tentu harus ada tindak lanjutnya. Ada 30 keluarga beresiko stunting yang akan diidentifikasi", tambah Kaper.

Kaper mengharapkan kerjasama dan konvergensinya, sehingga hasil audit stunting ini bisa ditindaklanjuti dalam upaya Penurunan Angka Stunting di Kabupaten Rokan Hulu.

Turut hadir Dinas Kesehatan, Tim Pakar Audit Kasus Stunting, OPD terkait, Satgas dan Technical Assistan Percepatan Penurunan Stunting dan PKB. (eca)

<https://riaupos.jawapos.com/riau/23/11/2022/288607/identifikasi-pengukuran-dan-audit-kasus-stunting-di-rohul.html>

Transformasi Penting untuk Percepat Penurunan Stunting

RIAU | Kamis, 24 November 2022 - 10:13 WIB

PEKANBARU (RIAUPOS.CO) - Transformasi sangat diperlukan dalam percepatan penurunan stunting. Hal itu di antaranya dapat diwujudkan lewat pendampingan kepada keluarga berisiko stunting, audit kasus stunting yang dilakukan melalui kegiatan penyuluhan dan pemberian bantuan sosial.

"Agar dapat berjalan efektif, konvergen dan terintegrasi, maka diperlukan kerja sama dan kolaborasi yang baik bersama mitra. Harapannya kerja sama dengan mitra kerja dari multi sektor seperti ini akan efektif untuk menghasilkan strategi intervensi yang variatif melalui berbagai elemen di masyarakat," ungkap Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan BKKBN RI Prof drh Muhammad Rizal Martua Damanik MRepSc PhD dalam Kongres Nasional (Konas) XV Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) dan Forum Ilmiah Tahunan VIII (FIT-VIII) mulai 22-26 November di Hotel Labersa, Pekanbaru.

Menurut Rizal yang mengangkat materi tentang percepatan penurunan stunting dengan pengendalian perilaku merokok, IAKMI sangat diperlukan dalam upaya percepatan penurunan stunting tersebut.

Selain Rizal, dr Eni Agustina, MPh yang merupakan Deputi Keluarga Berencana Kesehatan Reproduksi BKKBN RI juga menjadi narasumber dengan materi evaluasi implementasi peran keluarga dan percepatan penurunan stunting.

Selanjutnya, pimpinan Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena SSi Apt sebagai keynote speech. Dalam pemaparannya, Emanuel mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya menjalin sinergi dengan semua pihak agar dapat menurunkan angka stunting sesuai dengan amanat presiden untuk menurunkan angka stunting hingga ke angka 14 persen pada 2024.

Strategi percepatan penurunan stunting dilakukan melalui penajaman intervensi melalui pendampingan pra nikah, hamil, dan masa interval. Pelayanan program Bangga Kencana sebagai salah satu pilar dalam upaya meningkatkan kesehatan ibu dan anak terbukti efektif dan hemat biaya dalam mengurangi beberapa penyakit pada ibu dan anak yang tentu pada akhirnya juga akan mendukung penurunan prevalensi stunting.

"Pada intervensi ini diperlukan dukungan ahli kesehatan masyarakat serta tenaga kesehatan," ungkap Emanuel.

Hadir dalam acara tersebut, pengurus IAKMI pusat, pengurus dan anggota IAKMI daerah dan cabang seluruh Indonesia.

Kemudian, pengurus dan anggota AIPTKMI, BKKBN, organisasi profesi, PAMI, ISMKMI, stakeholder rumah sakit di seluruh Indonesia, LSM/NGO, pemerhati kesehatan masyarakat, pemerintah pusat dan daerah, serta perguruan tinggi.

Ketua Pelaksana Konas-XV IAKMI Dr Hermawan Saputra SKM. MARS CICS mengatakan, tahun ini Konas-XV mengusung tema Evaluasi Implementasi Transformasi Sistem Kesehatan Menuju Cakupan Kesehatan Semesta 2030.

Topik dan tema yang disusun ini berkaitan dengan stunting, jaminan kesehatan nasional, isu strategis kebijakan kesehatan yang sedang hangat diperbincangkan.

Sementara itu, Ketua Umum AIPTKMI Dr Agustin Kusumayati MSc P.Hd berharap pertemuan ini menghasilkan ide-ide baru yang segar. "Saya percaya pertemuan kita dalam Kongres Nasional ini merupakan pertemuan yang strategis. Disini kita bertemu, bertukar pikiran, bertukar pengalaman, sehingga harapannya dapat membuahkan ide-ide baru yang segar," ujarnya.

Tidak hanya menyangkut konsep-konsep besar mengenai keprofesian ataupun keilmuan kesehatan masyarakat, tetapi juga terkait usulan-usulan teknis mengenai apa yang harus dilakukan sebagai langkah konkrit untuk menghadapi situasi yang sekarang sedang berkembang dan mengantisipasi masalah yang mungkin muncul dimasa mendatang.

"Saya yakin pertemuan kita ini bisa membawa manfaat terbaik bagi masyarakat nusa dan bangsa kita," ujar Agustin Kusumayati.

Salah satu tujuan yang hendak dicapai melalui kongres ini adalah meningkatkan pengetahuan dan wawasan para praktisi, peneliti, dan pemerhati masalah kesehatan terhadap isu penting yang aktual dan strategis di bidang kesehatan masyarakat dan stunting pun termasuk ke dalamnya.

Sementara itu, Gubernur Riau yang diwakili Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau H Zainal Arifin, SKM MKes membuka kegiatan secara resmi. Dalam sambutannya, disampaikan bahwa permasalahan kesehatan yang menjadi prioritas tahun ini adalah stunting, angka kematian ibu, angka kematian bayi, tuberculosis, dan penyakit tidak menular.

"Isu ini tentunya sangat relevan dengan konas ini. Melalui pertemuan ini diharapkan ada inovasi, terobosan, serta lompatan yang sangat cepat untuk mendukung program pemerintah di bidang kesehatan," ujar Zainal. (eca)

<https://riaupos.jawapos.com/riau/24/11/2022/288677/transformasi-penting-untuk-percepat-penurunan-stunting.html>



LET'S GO BEYOND

Mudahnya punya TOYOTA dengan EZ Deal

EASY DEAL

Agung TOYOTA

ALL NEW
AVANZA

1.6 AT 1500 cc 1500 cc 1500 cc 1500 cc




Rangking! Dealer Agung Toyota:
Pekalongan, Sukono (0761-227221)
Pekalongan, Suroboyo (0761-217109)

Pekalongan, SBR, Anas (0761-500588)
Pekalongan, Suroboyo (0761-217109)

Bogor, Bala (0764-883822)
Tangerang, Suroboyo (0764-883822)

Sing Sing (0762-43237)
Tangerang, Suroboyo (0764-883822)

Demak (0765-429230)
Tangerang, Suroboyo (0764-883822)

Agung Toyota | www.agungtoyota.co.id

Agung Toyota

Olah Makanan yang Menarik dan Sehat

● BKKBN Hadirkan Chef untuk Latih Memasak Mostell Dori

PEKANBARU, TRIBUN - Pekanbaru memiliki sejumlah bahan makanan yang sehat dan bergizi. Bahkan, bahan makanan itu jika diolah dengan baik, bisa bermanfaat untuk mengatasi masalah stunting.

"Salah satunya ikan patin. Di Pekanbaru, ikan patin begitu mudahnya dijumpai. Harganya juga relatif murah," ujar Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) Provinsi Riau, Mardalena Wati Yulia.

Ikan patin, tambahnya, memiliki kandungan gizi yang banyak. Hanya saja, belum banyak masyarakat yang tahu bagaimana mengolahnya

menjadi makanan yang menarik dari segi tampilan dan enak dimakan oleh anak.

Berdasarkan kondisi itu, BKKBN menggelar Pemberdayaan Kelompok Masyarakat di Kampung KB dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting dan Pembinaan Dashat di Kampung KB Dwikora, Jumat (25/11).

Dashat atau Dapur Sehat Atasi Stunting merupakan program yang dilakukan untuk mensosialisasikan makanan-makanan yang bermanfaat dalam mengatasi masalah kurang gizi.

Kepada para ibu yang hadir dalam acara itu, BKKBN menghadirkan Chef Deden

Prihandy dari Indonesia Chef Association (ICA). Deden mengajarkan dua resep yang mudah dibuat. Yaitu resep puding lumut daun katuk dan mostell dori yang merupakan paduan singkong dengan ikan dori (patin).

Semua bahan makanan ini sangat mudah dijumpai. Harganya pun terbilang murah di Pekanbaru. Dengan resep yang diperkenalkan ini, para ibu diharapkan bisa membuat makanan yang menarik dan sehat.

Mardalena Wati Yulia menjelaskan, program ini merupakan langkah nyata dalam percepatan penurunan stunting di Riau. Seperti diketa-

hui, katanya, stunting disebabkan tidak hanya oleh kekurangan gizi, tapi juga pola pengasuhan dan lingkungan.

Kekurangan gizi pun tidak hanya dipengaruhi faktor kemiskinan tapi juga ketidakta-huan masyarakat mengolah makanan yang layak dikonsumsi.

Lurah Sukamulya, Azwar yang turut hadir berharap seluruh kader KB lebih giat mensukseskan program pemerintah untuk menurunkan angka stunting. Diharapkan juga lewat kegiatan ini masyarakat mendapatkan pengetahuan lebih tentang cara mengolah makanan yang sehat dan bergizi. **(rls)**



FOTONSTIMEWA

MEMASAK - Chef Deden memasak resep puding lumut daun katuk dan mostell dori yang bahannya mudah didapat kepada Kelompok Masyarakat di Kampung KB Dwikora, Jumat (25/11) sore.

Ketua Perhumas Pekanbaru Raih Penghargaan

PEKANBARU (RP)- Ketua Perhumas Pekanbaru Rosita meraih penghargaan sebagai pejabat berprestasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau pada Selasa (29/11). Penghargaan diserahkan Sekdaprov Riau SF Haryanto di Balai Serindit, Gedung Daerah Riau.

Usai menerima penghargaan, Rosita mengaku, apresiasi itu merupakan amanah berat baginya dalam menjalankan tugas sebagai ASN.

"Ini tentunya akan menjadi tolok ukur dalam menjalankan fungsi dan tugas sebagai ASN. Ke depan, tolok ukur itu menjadi standar yang harus selalu dijaga dan ditingkatkan. Semoga, saya mampu mengembangkannya," kata Rosita.

Penghargaan itu hanya diberikan kepada 16 ASN terpilih di lingkungan Pemprov Riau.

Penghargaan diberikan dalam empat kategori. Kategori pertama

adalah untuk pejabat administrator/koordinator. Lalu, kategori pejabat pengawas/subkoordinator, kemudian kategori pejabat fungsional tertentu. Dan terakhir, kategori pejabat pelaksana.

Untuk masing-masing kategori diberikan penghargaan untuk empat orang terpilih.

Rosita sendiri mendapatkan penghargaan dalam kategori pejabat pengawas atau sub koordinator.

Rosita merupakan ASN yang sudah mengabdikan diri di Dinas Kesehatan Riau selama 32 tahun terakhir.

Berbagai jabatan pernah diemban oleh sosok yang dikenal luwes dan ramah tersebut.

Dari mulai staf biasa, lalu pada tahun 2016 diangkat menjadi Kasi Promkes. Pada tahun 2021 menduduki jabatan fungsional sebagai sub koordinator promkes dan pemberdayaan masyarakat. (rls/egp)



SERAH TERIMA: Serah terima nota kesepakatan atas pengesahan RAPBD 2023 oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti H Adil ketika didampingi pimpinan DPRD Meranti, Fauzi Hasan dan jajaran, Selasa (29/11/2022).

RAPBD Meranti 2023 Disahkan

Laporan WIRA SAPUTRA, Selatpanjang

BUPATI Kepulauan Meranti H Muhammad Adil SH MM meminta jajarannya untuk segera menindaklanjuti hasil dari pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2023.

Demikian disampaikan Adil pascapapirpurna tentang laporan, persetujuan Banggar dan pengesahan terhadap RAPBD di Selatpanjang, Senin (28/11).

"Berbagai tahapan telah kita lalui sampai pada hari ini, se-

daerah," sebutnya.

Dijelaskannya, beberapa pertemuan antara legislatif dan eksekutif telah dilakukan, begitu juga masukan dan saran telah dipertimbangkan. Hal itu, kata bupati tentu saja memerlukan pemikiran dan pengorbanan waktu yang tidak sedikit.

"Saya juga mohon maaf apabila selama dalam pembahasan Ranperda ini ditemui berbagai permasalahan, kekurangan maupun perbedaan pendapat dalam melihat persoalan yang ada," ujarnya.

Bupati juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada ja-

dan sesuai yang kita harapkan bersama," ujarnya.

Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kepulauan Meranti, Fauzi Hasan ini, dihadiri 23 anggota. Adapun laporan Banggar disampaikan oleh juru bicara Pandumana Siregar.

Secara rinci data yang diterima *Riau Pos*, anggaran pendapatan daerah APBD 2023 sebesar Rp1.462.127.490.525 melalui PAD sebesar Rp421.579.085.283, dan pendapatan transfer Rp1.040.548.405.242.

Sementara kumulatif belanja daerah sebesar Rp1.516.308.620.000 be-

transfer Rp161.659.952.300. Sedangkan pembiayaan daerah APBD 2023 sebesar Rp57.181.129.475.

Penerimaan pembiayaan sebesar Rp113.485.099.621 yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya Rp58.485.099.62, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp55.000.000.000.

Sementara pengeluaran pembiayaan Rp56.303.970.146 yang terdiri dari penyerahan modal daerah sebesar Rp15.000.000.000, pembiayaan cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebesar



TERIMA PENGHARGAAN: Ketua Perhumas Pekanbaru, Rosita saat menerima penghargaan dari Sekretaris Daerah Riau, SF Haryanto di Pekanbaru, Selasa (29/11/2022).

Dandim Inhu dan Ketua Persit Dikukuhkan sebagai BAAS

PEKANBARU (RP)- Pengukuhan Bapak dan Bunda Asuh *Stunting* kepada Letkol Kav Dani Prasetyo Wibowo SSoos MIP dikukuhkan

sebagai Bapak Asuh dan Ny Nurul Dani Prasetyo selaku Ketua Persit KCK Cab LI DIM 0302/Inhu dikukuhkan sebagai Bunda Asuh

Anak *Stunting* Indragiri Hulu 2022.

Pengukuhan Bapak Asuh dan Bunda Asuh Anak *Stunting* tersebut dilakukan pemasangan sele-

mpang Bapak dan Bunda Asuh *Stunting* secara langsung oleh Bupati Indragiri Hulu Rezita Meylani Yopi di Gedung Serbaguna Iro Kecamatan Lirik, Selasa 29/11) disaksikan Ketua Perwakilan BKKBN Riau Mardalena Wati Yulia dan fokokipinda.

Setelah dikukuhkan sebagai Bapak dan Bunda Asuh Anak *Stunting*, Dandim Dani Prasetyo Wibowo mengatakan, pihaknya akan segera berkoordinasi pemerintah dengan instansi terkait guna merumuskan strategi terbaik. Mengangkat dan membuat program guna mempercepat proses penurunan stunting di wilayah kerjanya khususnya Indragiri Hulu.

"Maka kami mengajak untuk selalu berkoordinasi dengan baik. Menyusun mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan tindakan di lapangan dalam rang-

ka mengatasi penurunan angka stunting di wilayah Kabupaten Indragiri Hulu," kata Dani.

Dandim menambahkan, pengukuhan Bapak dan Bunda Asuh Anak *Stunting* kepada dirinya merupakan bentuk dukungan terhadap upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Inhu.

"*Stunting* merupakan gangguan pertumbuhan anak. Anak tidak tumbuh tinggi seperti anak seusianya akibat kekurangan gizi jelas ini kurang baik dalam tumbuh kembang anak," ujar Dandim.

Untuk dapat mengurangi jumlah anak yang masuk dalam kategori *stunting*, tentu ke depan nantinya Bapak dan Bunda Asuh Anak *Stunting* melakukan pendampingan dan pengawasan,

memberikan bantuan dalam pemenuhan kebutuhan gizi. "Saling koordinasi dan kerja sama dalam penanganan stunting agar anak

tersebut bisa tumbuh dan berkembang," terang Dandim.

Sementara Bupati Inhu Rezita Meylani Yopi SE mengatakan, dengan dikukuhkan yang Dandim Inhu dan Ketua Persit sebagai Bapak Asuh dan Bunda Asuh Anak *stunting* yang dicanangkan dapat menekan angka anak *stunting* hingga untuk ke depannya Inhu menjadi zero anak *stunting* tentunya diperlukan *action* di lapangan.

"Artinya, seluruh jajaran aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Inhu dan seluruh fokokipinda masing-masing memiliki peran penting dalam penanganan anak *stunting*," ungkapnya.

Hal tersebut dimaksudkan agar para orangtua yang memiliki anak *stunting* bisa mudah berkomunikasi dengan Bapak Asuh dan Bunda Asuh yang ada. "Saling disebelahnya, orangtua asuh masing-masing (*eca*)



FOTO BERSAMA: Bupati Inhu Rezita Meylani Yopi SE foto bersama Kepala Perwakilan BKKBN Riau Mardalena Wati Yulia, Dandim Inhu Letkol Kav Dani Prasetyo Wibowo saat pengukuhan Bapak Asuh *Stunting*. Selasa (29/11/2022).

BRGM Bantu Bangun Infrastruktur Pemabasan Gambut

perbaikan tata air dan restorasi gambut dengan harapan tercapainya tingkat emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 140 juta ton CO2e pada tahun 2030.

gambut terdapat 4 strategi yang akan dilaksanakan oleh pemerintah yaitu menjaga tingkat kebasahan lahan gambut, memperbaiki kondisi tutupan lahan, merevitalisasi kegiatan pemanfaatan

kelembagaan pengelolaan ekosistem gambut.

"Guna menjaga tingkat kebasahan lahan gambut maka kanal-kanal yang telah terbangun perlu di jaga tinggi muka airnya dengan

Meranti Menjadi Kabupaten Pertama

Sambungan dari hal.16

variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi dan indeks tertentu.

Detail Siska merincikan bahwa UMK Kepulauan Meranti 2023 sebesar Rp3.224.635. Sedangkan 2022 hanya Rp2.985.000. Sedangkan 2021 lalu Rp2.985.000 dan 2020 silam Rp2.983.926. Artinya kenaikan dominan terjadi pada tahun ini ketimbang tiga tahun belakangan.

Meranti sendiri menetapkan upah minimum 2023 merupakan solusi yang bersifat situasional dalam rangka menjaga daya beli pekerja/buruh dan ketenagakerjaan serta kelangsungan usaha. Namun kenaikan tidak boleh di atas 10 persen," ujarnya.

Selain itu arah penetapan juga ditindaklanjuti setelah pembahasan di tingkat Pemprov Riau rampung dari batasan waktu paling lambat 7 Desember 2022

mendatang. Dengan demikian untuk saat ini, tingkat kabupaten dan kota di Riau, Kepulauan Meranti menjadi yang pertama mengajukan rekomendasi ke Bupati dan Gubernur Riau.

"Jadi kita yang pertama dari kabupaten dan kota di Provinsi Riau lain. Setelah ini tahapan yang akan ditempuh meminta rekomendasi bupati untuk diajukan kepada Gubernur Riau," ujarnya. (wir)

kanal," kata Murod mengawali acara Verifikasi Administrasi SPJ Tahap II Pokmas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pemabasan Gambut (PIPG) 2022 di Pekanbaru, Selasa (29/11).

Ia menjelaskan, salah satu kegiatan restorasi gambut pada tahun 2022 adalah Pembangunan Infrastruktur Pemabasan Gambut berupa pembangunan sekat kanal yang berada di dalam empat KHG Prioritas di Riau yang dilaksanakan melalui tugas pembantuan.

"Namun karena terdapat *Automatic Adjustment* (AA) kegiatan pembangunan IPG hanya dilak-

Sungai Kiyap-Sungai Kerumutan dan KHG Sungai Barumun-Sungai Kubu," jelasnya.

Lanjut Murod, DLHK Riau melalui Tugas Pembantuan (TP) tahun 2022 ini melaksanakan kegiatan PIPG berupa sekat kanal atau kanal blocking pada 2 KHG tersebut diatas di Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Pelalawan pada 7 Kelompok Masyarakat (Pokmas) sebanyak 31 unit.

"Kegiatan ini sudah berjalan kurang lebih 110 hari kalender dengan harapan realisasi fisik harus sudah mencapai 100 persen dan pokmas telah menyampaikan laporan pertanggung jawaban

persen," ungkapnya. Verifikasi fisik lapangan telah dilaksanakan dari tanggal 22-26 November 2022 oleh tim verifikasi TP DLHK dengan tenaga Teknis BRGM RI. "Saat ini kita akan melakukan verifikasi administrasi berupa verifikasi pertanggungjawaban keuangan bersama tim dari pokja keuangan BRGM RI," jelasnya.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan verifikasi ini diimbua kepada tim agar dapat bekerja maksimal dengan baik dan mengikuti peraturan serta pedoman kerja sesuai ketentuan yang ada. "Sehingga tidak timbul permasalahan dikemudian hari," pesannya. (sol)

Belasan ASN Pemrov Riau Raih Penghargaan

Sambungan dari hal.16

Lencana Karya Satya, dan 16 ASN di

akan datang.

"Selamat memperingati Hari

KONGRES NASIONAL XV DAN FIT-VIII DI RIAU

Deputi KBKR BKKBN: Transformasi Upaya Penurunan Stunting

■ LAPORAN: **RENNY RAHAYU**
Liputan Pekanbaru

PEKANBARU (HR) - Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan BKKBN RI, Prof. drh. Muhammad Rizal Martua Damanik, MRepSc, PhD mengatakan bahwa pelayanan program Bangsa Kencana sebagai salah satu pilar dalam upaya meningkatkan kesehatan ibu dan anak.

Hal ini terbukti efektif dan hemat biaya dalam mengurangi beberapa penyakit pada ibu dan anak yang tentu saja akan mendukung penurunan prevalensi stunting. Pada intervensi ini dibutuhkan dukungan ahli kesehatan masyarakat serta tenaga kesehatan.

Demikian disampaikan saat menjadi salah satu narasumber dalam acara Kongres Nasional XV (Konas-XV) dan Forum Ilmiah Tahunan VIII (FIT-VIII), yang digelar di propinsi Riau, 22-26 November, di Hotel Labersa Pekanbaru.

Menurutnya, strategi percepatan penurunan stunting dilakukan melalui penajaman intervensi melalui pendampingan yang nilai, hasil, dan masa interval. Oleh sebab itu, transformasi sangatlah dibutuhkan dalam upaya antipasi penurunan stunting, melalui kegiatan penyuluhan dan pemberian bantuan sosial.

"Transformasi sangat dibutuhkan dalam Percepatan Penurunan

Stunting, diantaranya pendampingan kepada keluarga beresiko stunting dan audit kasus stunting yang dilakukan melalui kegiatan penyuluhan dan pemberian bantuan sosial. Agar dapat berjalan efektif, konvergensi dan terintegrasi, maka diperlukan kerjasama dan kolaborasi yang baik bersama mitra," ujarnya, Kamis (24/11).

Dengan kerjasama antara mitra kerja dari multi-sektor diharapkan akan bisa menghasilkan strategi intervensi yang variatif melalui berbagai elemen di masyarakat. Dalam hal ini tentunya IAKMI sangat dibutuhkan dalam upaya Percepatan Penurunan Stunting.

Sementara itu, Ketua umum AIPKMI, Dr. Agustin Kusumayati, M.Sc, PhD berharap pertemuan ini menghasilkan ide-ide baru yang segar. Dalam kongres nasional ini bisa sebagai wadah untuk bertukar pikiran mengenai apa yang harus dilakukan sebagai langkah konkret untuk menghadapi situasi yang sedang berkembang dan mengantisipasi masalah muncul



SUASANA Forum Ilmiah Tahunan di yang Kongres Nasional IAKMI yang menghadirkan narasumber dari BKKBN RI, Kamis (24/11)

dan profesional ataupun keilmuan kesehatan masyarakat, tetapi juga terkait urusan-urusan teknis mengenai apa yang harus dilakukan sebagai langkah konkret untuk menghadapi situasi yang sedang berkembang dan mengantisipasi masalah muncul

dalam mendatang.

"Saya yakin pertemuan kita ini bisa membawa manfaat terbaik bagi masyarakat nusa dan bangsa kita," ungkap Agustin.

Gubernur Riau yang diwakili oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, H. Zainal Arifin, SKM,

M.Kes mengatakan bahwa permasalahan kesehatan yang menjadi prioritas tahun ini adalah Stunting, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Tuberculosis, dan penyakit tidak menular. Itu ini tentunya sangat relevan dengan komas ini. Melalui

pertemuan ini diharapkan ada inovasi, terobosan, serta kolaborasi yang sangat cepat untuk mendukung program pemerintah di bidang kesehatan.

Senada hal tersebut, Pimpinan Komisi IX DPR RI, Ekmansul Melkiades Laka Lena, SSI, Apt juga

menambahkan pihaknya terus berupaya untuk menjalin sinergi dengan semua pihak agar dapat menurunkan angka stunting sesuai dengan amanat presiden untuk menurunkan angka stunting hingga ke angka 14% di tahun 2024. ***

Pemprov Riau akan Kirim Bantuan Bencana Alam Cianjur Rp300 Juta

PEKANBARU (HR) - Pemerintah Provinsi Riau telah merencanakan akan mengirim bantuan kemanusiaan untuk korban bencana alam di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat (Jabar) beberapa hari ini. Adapun bantuan tersebut, merupakan sumbangan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Badan Usaha Misk Daerah (BUMD) Riau.

"Kami minta rekan-rekan OPD dan BUMD mengumpulkan uang untuk membantu

saudara kita di Kabupaten Cianjur yang terkena musibah bencana alam," kata Gubernur, Jumat (25/11).

Gubernur mengatakan, bantuan yang bakal dikirim ke Kabupaten Cianjur, Jabar tidak berbentuk barang karena bisa membekas susah dan membutuhkan waktu lama.

"Bantuan yang diberikan bentuk tidak barang. Karena kalau barang susah bawa dari sini (Riau), dan takut rusak," ujarnya.

Disamping besaran ban-

tuan yang akan dikirim ke Cianjur, Gubri memperkirakan dana yang terkumpul bisa mencapai mencapai Rp300 juta lebih.

"Tapi untuk pastinya nanti Insya Allah hari Senin atau Selasa pekan depan sudah diketahui besar bantuan. Saya juga sudah bilang ke Kepala Dinas Sosial dan Kabesa BPBD Riau hari Selasa hari sudah berangkat mengantar uang itu ke Kabupaten Cianjur," tutupnya. (cike/nie)

Realisasi Kegiatan OPD Rata-Rata di Bawah 80 Persen

PEKANBARU (HR)

Gubernur Riau menyayangkan bahwa dari hasil evaluasi APBD Riau, realisasi keuangan propinsi Riau baru mencapai 71,01 persen. Namun setelah dikonfirmasi ke masing-masing OPD, ternyata masih banyak kegiatan yang belum masuk ke sistem.

Demikian disampaikan saat menggelar pertemuan bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lantai Auditorium Lantai 8 Gedung Lancang Kuning, Kantor Gubernur Riau, yang digelar tertutup membahas realisasi fisik dan keuangan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Riau tahun 2022, Jumat (25/11).

"Hari ini kita lakukan rapat evaluasi terhadap realisasi akhir bulan November ini, terutama terhadap semua kegiatan APBD Riau 2022," ujarnya.

Diringga meminta kepada seluruh OPD untuk melakukan perbaikan data, karena berdasarkan laporan dan gambar kami sebenarnya realisasi keuangan kita sudah diatas 80 persen. Kalau realisasi fisik tentu lebih tinggi. Tapi realisasi keuangan itu yang perlu, karena itu laporannya yang sampai ke Jakarta. Untuk itu, Gubri minta kepada seluruh OPD di lingkungan Pemprov Riau untuk mengecek kembali progres kegiatannya, terutama kegiatan yang berkaitan dengan keuangan untuk dilaporkan pada pekan depan.



GOVERNUR Riau, Syamsuar

"Sebab tadi masih banyak realisasi keuangan yang belum dilaporkan. Sehingga realisasi keuangan kita bisa meningkat. Karena target kita mudah-mudahan minimal bisa mencapai 90 persen. Makanya hari ini kita gesa agar teman-teman OPD lebih cepat melaporkan semua kegiatan fisik maupun non fisik," ungkapnya.

Ditanya OPD mana saja yang realisasi kegiatannya masih rendah, Gubri menyatakan ada beberapa OPD. Namun sebenarnya realisasi

OPD sudah tinggi, hanya saja belum dilaporkan sehingga belum masuk ke sistem.

"Jadi itu yang tadi kami koreksi. Karena itu merupakan kelalaian dari petugas yang melaporkan perkembangan progres semua kegiatan di masing-masing OPD," tukasnya.

Untuk diketahui, berdasarkan data yang dihimpun, realisasi kegiatan OPD Pemprov Riau rata-rata masing-masing dibawah 80 persen.

Dimana untuk OPD yang realisasi keuangan paling rendah adalah Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Kawasan

Pemukiman Pertanahan (PUPR-PKPP) Riau 59,74 persen, sedangkan progres fisik 67 persen. Hal ini karena saat ini kegiatan masih proses pekerjaan.

Selain PUPR-PKPP Riau, realisasi keuangan yang masih rendah adalah Dinas Kesehatan Riau juga masih 63,01 persen, dan fisik 88,71 persen.

Sedangkan realisasi keuangan tertinggi adalah Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Riau 88,50 persen, dan fisik 90,33 persen. Kemudian disusul Satpol PP dan BPBD Riau masing-masing 81,85 persen. (mor/nie)

DARI 47

UIR, PTS Terbaik Nasional Penerima Pengabdian Masyarakat

PEKANBARU (HR) - Dari 47 Perguruan Tinggi Swasta (PTS), Universitas Tera Riau (UIR) berhasil menduduki posisi ke-27 universitas terbaik penerima Program Inovatif Pengabdian Masyarakat Terintegrasi dengan HKM Berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2022.

Selain itu, UIR juga berhasil meraih predikat yang di-

pergunakan sebagai pengakuan atas kinerja yang telah dilakukan oleh UIR dalam melaksanakan program pengabdian masyarakat yang telah dilakukan oleh UIR.

UIR juga berhasil meraih predikat yang di-

pergunakan sebagai pengakuan atas kinerja yang telah dilakukan oleh UIR dalam melaksanakan program pengabdian masyarakat yang telah dilakukan oleh UIR.

berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh UIR.

Selanjutnya, capaian yang telah didapatkan itu, UIR tentu akan terus ber-

komitmen dalam melaksanakan program pengabdian masyarakat yang telah dilakukan oleh UIR dalam melaksanakan program pengabdian masyarakat yang telah dilakukan oleh UIR.